

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Wacana Pertambangan dan Praktik Jurnalisme Lingkungan Hidup Surat Kabar Lokal Yogyakarta

Sub Judul

Studi Deskriptif Kualitatif dengan Metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Mengenai Rencana Pembangunan Proyek Pertambangan Pasir Besi Kulonprogo dalam Tajuk dan Liputan Khusus di Surat Kabar *Harian Jogja* periode Juni 2008- November 2009.

B. Latar Belakang

Pertambangan dalam bentuk apapun, bagaikan dua sisi mata uang yang kontras. Di satu sisi, ia dipandang mampu memberikan manfaat ekonomis dalam bentuk pemasukan pendapatan bagi pemerintah, namun di sisi lain ada kecemasan, yang sayangnya, selalu menjadi kenyataan bahwa keberadaan pertambangan juga membawa pengaruh buruk pada dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Siti Maimunah mengatakan, “Tak dipungkiri, pertambangan memberikan pendapatan bagi negara dan juga pemerintah daerah. Tetapi yang lebih tak terbantahkan adalah bagaimana daya rusak sektor ini berkontribusi terhadap pemiskinan di sekitar kawasan.” (Maimunah, 2007). Dalam catatan studi yang dilakukan Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan, industri

pertambangan sebagai bentuk kongkret sektor pertambangan menyumbang sekitar 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). (Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan, 2008:1). Namun dari sisi dampak lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya.¹

Mungkin dua hal ini pula yang menjadi persoalan pada kasus rencana pembangunan pertambangan pasir besi Kulonprogo. Sejak pemerintah Kulonprogo menyetujui rencana kerjasama investor PT. Jogja Magasa Iron yang bekerjasama dengan pihak Australian Indomines Limited, reaksi keras penolakan masyarakat petani pesisir terus bermunculan. Beragam wacana dikemukakan mulai dari kemungkinan rusaknya lingkungan serta resiko yang bisa didapat karena mengusik keberadaan gumpul pasir hingga hak penggunaan atas tanah.

Terlepas dari cakupan persoalan pro-kontra, setuju atau tidak setuju pabrik didirikan, persoalan utama yang terlihat dari isu penambangan pasir besi Kulonprogo tersebut bisa ditarik sebagai sebuah wacana lingkungan hidup. Sebab, tak hanya membahas bagaimana persoalan ganti rugi di tingkat sosial namun juga mencakup masa depan lingkungan hidup dan keberlangsungan kelestarian lingkungan. Pengangkatan wacana lingkungan hidup semacam ini memerlukan peran jurnalisme lingkungan hidup dari pers. Dalam tataran lokal, akan lebih tepat

¹ Dampak yang terlihat tidak sering ditunjukkan oleh media massa, namun dalam sebuah film karya Riri Riza dan Mira Lesmana, *Laskar Pelangi*, area bekas eksploitasi PT. Timah Indonesia sempat digunakan sebagai seting cerita dalam film tersebut. Terlihat bahwa area tanah sudah berubah berwarna putih dan mengandung zat-zat beracun. Contoh lain adalah saat isu konflik PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan penduduk setempat ditayangkan di televisi, terlihat bentangan alam yang berubah drastic menjadi lahan gundul dan terlihat kering sekaligus tandus. Ada yang mengatakan bahwa limbah *tailing* PTFI juga mencemari sungai sekitarnya.

jika media lokal pula yang mengangkat persoalan itu sehingga lebih memperkaya wawasan khalayak pembaca lokal untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lingkungannya. Segi kedekatan psikologis dan geografis juga menguntungkan bagi media lokal sebab pengkonsumsi informasi terbesar dari produk beritanya berasal dari masyarakat lokal.

Hanya saja, kadang persoalan lingkungan hidup di suatu daerah tidak mendapatkan *coverage* atau perhatian sebagai isu lingkungan hidup oleh media lokal di wilayah itu. Mereka (media pers) tidak mengupasnya dari kerangka berpikir persoalan lingkungan hidup sebagai sebuah bentuk praktik jurnalisme lingkungan hidup. Penyebabnya bisa saja beragam. Mungkin media tersebut memang tidak memahami apa yang dinamakan praktik jurnalisme lingkungan hidup bagi realitas-realitas lingkungan hidup, tidak memiliki perhatian di situ, atau bahkan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani liputan lingkungan hidup. Ana Nadya Abrar mengatakan bahwa tak semua berita yang menyangkut persoalan lingkungan hidup dapat dimuat di media massa (Abrar, 1993:8). Hal ini, menurut Abrar disebabkan karena berita semacam itu biasanya mengundang konflik kepentingan berbagai pihak. Adanya berbagai macam benturan kepentingan itulah yang membuat berita lingkungan hidup tak pernah bisa memuaskan semua pihak, “Selalu saja ada yang diuntungkan. Sayang pengalaman menunjukkan yang sering diuntungkan adalah pihak yang berkuasa atau yang kaya” (Abrar, 1993:8-9).

Berangkat dari kenyataan inilah, lanjut Abrar, timbul gagasan dari para ahli untuk memperkenalkan jurnalisme lingkungan hidup yang “berpihak pada

kesinambungan lingkungan hidup.” (Abrar, 1993:8-9). Artinya, penelitian beritanya diorientasikan kepada pemeliharaan lingkungan hidup sekarang agar bisa diwarisi oleh generasi berikutnya dalam keadaan yang sama, bahkan kalau bisa lebih baik lagi (Abrar, 1993:9).

Dengan melihat kondisi yang ada di atas, peneliti merasa tertarik untuk melihat bagaimana wacana lingkungan hidup direpresentasikan atau dibingkai dan dihadirkan kembali oleh media lokal dalam bentuk pemberitaan khususnya berita dan tajuk rencana. Peneliti mengambil contoh obyek analisis wacana persoalan lingkungan hidup dari kasus penambangan pasir besi Kulonprogo sebab persoalan ini memiliki nilai *magnitude* atau daya tarik cukup besar baik tingkat lokal Kulonprogo maupun regional DIY. Adanya konflik yang masih berlangsung sampai sekarang antara pihak pro dan kontra pelaksanaan proyek membuat rentetan peristiwa yang mengikuti sepanjang perkembangan kasus sebagai hal yang menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana media lokal setempat, seperti *Harian Jogja (Harjo)* misalnya, membawa wacana-wacana yang ada dan mengkonstruksikannya kembali dalam bentuk pemberitaan. Bagaimanapun, persoalan pasir besi Kulonprogo bisa dikatakan sebagai salah satu realitas yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat meski dalam tingkatan lokal. Maka, sudah selayaknya media lokal seperti *Harjo* memiliki perhatian khusus.

Sebagai salah satu surat kabar harian lokal yang terbit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Harjo* memang masih tergolong sangat muda. *Harian Jogja* terbit perdana pada Mei 2008 silam dan terjun dalam persaingan industri pers

daerah Yogyakarta yang sudah terbilang cukup ramai. Menurut data oplah koran lokal tahun 2009, *Harian Jogja* memiliki tiras sebanyak 11.000 eksemplar untuk distribusi DIY dan sekitarnya.² Dari segi usia, *Harjo* belum dapat dikatakan “berpengalaman” karena terhitung masih sangat muda. Namun justru sebagai sebuah media baru, peneliti mengasumsikan ia memiliki kelebihan yang ditawarkan baik dari segi tampilan maupun isi sehingga berani berhadapan langsung dengan pemain lama seperti *Kedaulatan Rakyat* atau *Bernas*. Apalagi, historis pendiriannya tak dapat dilepaskan dari harian *Bisnis Indonesia* sebagai induk perusahaannya. *Bisnis Indonesia* merupakan koran nasional yang berbasis di Jakarta dan memuat isu-isu utama mengenai bisnis, perekonomian dan dunia usaha. Sebab itu, menarik rasanya jika dapat mencari tahu apakah kultur *Bisnis Indonesia* misalnya, mempengaruhi cara pandang *Harjo* melihat isu ini. Apakah sebagai isu ekonomi dan bisnis? Atau sebagai persoalan lingkungan hidup? Jika sebagai isu lingkungan hidup, seperti apa wacana-wacana yang muncul, yang diwakili oleh pelibat-pelantun wacana dalam persoalan itu, direpresentasikan dalam pemberitaan media itu?

Studi mengenai pemberitaan lingkungan hidup

Studi mengenai peliputan atau pemberitaan persoalan lingkungan hidup memang bukanlah hal yang baru. Peneliti setidaknya menemukan lebih dari dua studi yang memiliki ketertarikan yang sama dalam melihat sikap dan

² data diambil dari data oplah koran lokal yang terdapat dalam skripsi Lidwina Chometa Halley Eprilianty “*Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY (Analisis Framing Media atas Opini Narasumber sebagai Representasi Masyarakat tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008 – 2013 dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja)*” (2009: 41). Peneliti kesulitan mendapatkan data terbaru sehingga meminjam data hasil penelitian terbaru yang dicantumkan dalam karya ilmiah Eprilianty tersebut.

profesionalitas media dalam mengangkat persoalan lingkungan hidup. Namun, sejauh yang peneliti amati, analisis yang dilakukan lebih sering berkaitan dengan analisis isi dengan metode analisis kuantitatif saja. Salah satunya Yunie Henoek tahun 2008 dalam skripsi berjudul "*Pemberitaan Pemanasan Global Pada Surat Kabar Kompas Tahun 2007*". Konsep jurnalisme lingkungan disoroti sebagai tugas media massa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kontrol sosial terhadap isu-isu pemanasan global. Penelitian tersebut menganalisis performa media (*media performance*) Surat Kabar Harian *Kompas* sepanjang tahun 2007. Performa media dalam melakukan jurnalisme lingkungan hidup dikatakan baik jika ia menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi pada isu-isu lingkungan hidup, dalam contoh penelitian tersebut, isu pemanasan global.

Penelitian lain dilakukan oleh, Eusebius D. Hariyadi, 2005, berjudul "*Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Surat Kabar: Studi Analisis Isi Berita Kerusakan Lingkungan Hidup pada Surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat dan Harian Bernas periode 1 November - 30 November 2004*". Penelitian tersebut juga menggunakan metode analisis isi. Kesimpulan dari penelitian tersebut, kedua media masih belum memenuhi syarat jurnalisme lingkungan hidup yang baik. Bagi peneliti, penelitian semacam ini memiliki kelemahan dari sisi kedalaman analisa sebab hanya menganalisa teks dari segi kuantitas pemberitaan yang muncul. Persoalannya, ketika berbicara mengenai wacana lingkungan hidup, indikator seperti jumlah berita, siapa pelibat wacana dan unsur objektivitas yang diukur dengan angka, kehadiran, absensi, tidak dapat menjelaskan bagaimana media mengkonstruksikan realitas lingkungan hidup dalam pola pemahaman

lingkungan hidup tertentu sehingga menghasilkan wacana lingkungan hidup tertentu. Bahkan, terkadang pemahaman jurnalisme lingkungan hidup hanya berhenti pada tataran banyak sedikitnya berita lingkungan hidup. Kategori berita lingkungan hidup pun masih banyak berkuat isu umum lingkungan global seperti: polusi, pemanasan global, pembalakan hutan, dan kekeringan. Topik-topik semacam itu memang merupakan topik yang gamblang untuk dianalisa sebagai pemberitaan *beat*/bidang lingkungan hidup. Namun persoalan lingkungan hidup juga sering beririsan dengan isu sosial maupun konflik. Hal ini justru menarik untuk ditelaah dari sisi media sebagai agen konstruksi wacana. Wacana lingkungan hidup seperti apa yang diposisikan sebagai wacana dominan dalam persoalan semacam itu? Hal ini yang menjadi fokus ketertarikan peneliti sehingga mengambil pendekatan metode analisis wacana kritis terhadap persoalan lingkungan hidup.

Penelitian dengan menggunakan metode analisis wacana kritis yang juga membahas persoalan lingkungan hidup dan jurnalisme lingkungan hidup peneliti temukan pada disertasi tingkat master (*master degree*) karya Njord V. Svendsen berjudul “*Reporting Air Pollution In South Durban: A Case Study Of Environmental Journalism In Durban Newspapers From 1985 – 2000*”. Penelitian tersebut sangat kompleks sebab menganalisis pemberitaan mengenai polusi udara dalam rentang waktu yang cukup lama dan memadukan dua jenis pendekatan penelitian yakni kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan pendekatan metode kualitatif namun menggunakan analisis

wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough, sementara Svendsen lebih menggunakan pendekatan Van Dijk pada level analisis teks.

Dalam pemahaman peneliti, praktik jurnalisme lingkungan hidup sebuah media pers tak dapat dilihat secara apa adanya dari jumlah berita lingkungan hidup yang dimuat, tingkat objektivitas ataupun kontinuitas pemberitaan lingkungan hidup. Kedalaman data juga penting, namun persoalannya, pemahaman atas jurnalisme lingkungan hidup sebagai sebuah idealisme terkadang kurang disorot.

Sebagai institusi pers yang memiliki fungsi *surveillance*, media sudah selayaknya menaruh perhatian juga pada isu lingkungan hidup. Dengan demikian, sepatutnya media menjadikan dirinya advokator dengan menyajikan informasi yang akurat dan lengkap saat meliput isu lingkungan hidup sehingga mampu menggerakkan kesadaran pelestarian lingkungan hidup. Media memang tak dapat hanya berfokus pada satu isu utama atau *beat* pemberitaan tertentu saja, lingkungan hidup misalnya, sementara realitas sosial yang ada ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Maka asumsi peneliti, kuantitas pemberitaan, banyak atau sedikit, mengenai isu lingkungan hidup belumlah cukup untuk mengupas jawaban untuk pertanyaan seperti apakah atau bagaimana media menjalankan jurnalisme lingkungan hidupnya? Kemanakah orientasi pemberitaan lingkungan hidupnya? Wacana apa yang dikonstruksikan oleh media dalam pemberitaan persoalan lingkungan hidupnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipahami dan dapat dijawab lebih dalam dan komprehensif jika kita menyertakan seluruh unsur yang mempengaruhi proses konstruksi wacana lingkungan hidup itu sendiri. Sebagai data utama

penelitian, peneliti akan mengambil teks dari berita liputan khusus dan tajuk rencana yang memuat tentang isu pasir besi Kulonprogo yang muncul dalam periode Juni 2008-November 2009. Rentang waktu ini dipilih sebab Juni adalah bulan kedua *Harian Jogja* terbit perdana namun sudah mengangkat persoalan ini hingga November 2009 yang merupakan periode setahun setelah Kontrak Karya pasir besi disahkan. Sementara sebagai metode penelitian, peneliti akan menggunakan analisis framing untuk menganalisa teks dalam kerangka metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough yang juga menyertakan tahap penelitian di tingkat *discourse practice* dan *sociocultural practice*.

Dengan demikian, peneliti berharap, penelitian ini setidaknya mampu mendeskripsikan persoalan utama yang ingin peneliti ketahui dari pemberitaan kasus pasir besi Kulonprogo yaitu representasi wacana dominan yang merupakan cerminan dari praktik jurnalisme lingkungan hidup sebuah media. Dengan melihat persoalan rencana penambangan pasir besi yang merupakan isu lingkungan hidup, khususnya pertambangan, peneliti berharap dapat mengetahui bagaimana wacana persoalan kasus tersebut direpresentasikan dalam media lokal, khususnya surat kabar harian lokal. Peneliti ingin tahu bagaimana wacana dominan persoalan lingkungan hidup - dalam contoh kasus ini rencana penambangan pasir besi Kulonprogo - direpresentasikan atau dihadirkan kembali, setelah melalui serangkaian proses seleksi dalam rutinitas media oleh *Harian Jogja*. Representasi atau kehadiran kembali atas wacana tersebut akan diasumsikan sebagai paradigma atau cara pandang media melihat persoalan lingkungan hidup yang

kemudian akan menunjukkan pada kita, seperti apa pemahaman atas lingkungan hidup yang kemudian mempengaruhi bagaimana praktik jurnalisme lingkungan hidup oleh media lokal.

C. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini peneliti terjemahkan dalam satu bentuk pertanyaan:

Bagaimana representasi wacana persoalan lingkungan hidup yang terlihat dari kasus rencana pembangunan proyek tambang pasir besi Kulonprogo dalam berita liputan khusus dan tajuk rencana *Harian Jogja*?

Jika diturunkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan operasional, sebagai penuntun praktis penelitian, maka peneliti mendeskripsikannya menjadi:

1. Apa wacana dominan lingkungan hidup, dilihat dari realitas sosiologis, pada wacana pertambangan pasir besi tersebut?
2. Apa wacana dominan lingkungan hidup yang direpresentasikan *Harian Jogja* dari hasil analisa teks tajuk dan liputan khusus serta analisis pemberitaan secara umum?
3. Apakah wacana dominan yang direpresentasikan pada Tajuk dan Liputan Khusus tersebut melegitimasi atau justru mendelegitimasi wacana dominan yang ada pada realitas sosiologis? Mengapa?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui representasi wacana persoalan lingkungan hidup yang terlihat dari kasus rencana pembangunan proyek tambang pasir besi Kulonprogo dalam berita liputan khusus dan tajuk rencana *Harian Jogja*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Sebagai tambahan referensi studi analisis wacana kritis pada pemberitaan mengenai persoalan lingkungan hidup bagi Program Studi Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana media merepresentasikan wacana persoalan lingkungan hidup dalam pemberitaan dan kaitannya dengan pengaruh level *discourse practices* dan *sociocultural practices*.
- b. Menambah referensi studi media dan pengamatan terhadap praktik jurnalisme lingkungan hidup media lokal bagi peneliti lain yang akan menggunakan metode analisis wacana kritis atau mengangkat topik mengenai jurnalisme lingkungan hidup.

F. Kerangka Teori

Di bagian kerangka teori ini peneliti akan memaparkan landasan teoritik yang akan digunakan sebagai acuan penelitian ini. Fokus utama penelitian ini adalah

melihat bagaimana representasi wacana lingkungan hidup pada wacana persoalan penambangan pasir besi Kulonprogo dalam pemberitaan surat kabar lokal. Peneliti memahami media memiliki peran dalam menghadirkan kembali (*re-present*) realitas sosiologis melalui bingkai tertentu yang menampilkan wacana dominan tertentu. Proses demikian bisa dipahami sebagai sebuah proses konstruksi media atas wacana, misalnya wacana lingkungan hidup. Kasus penambangan pasir besi Kulonprogo sendiri dapat dipandang sebagai satu contoh kasus lingkungan hidup, khususnya pertambangan. Sementara *Harian Jogja* adalah salah satu dari media lokal Yogyakarta yang dapat dipandang sebagai agen pers yang aktif mengkonstruksikan representasi wacana persoalan lingkungan hidup melalui pemberitaannya.

Dengan demikian, hal utama yang harus peneliti lakukan agar dapat mengemukakan konsep penelitian adalah dengan menyusun konseptualisasi wacana lingkungan hidup kemudian menunjukkan hubungannya dengan konsep konstruksi wacana yang dilakukan media massa.

F.1 Konseptualisasi Wacana Lingkungan Hidup

Untuk memperjelas tema dan arah penelitian, peneliti mencoba menggambarkan terlebih dahulu konseptualisasi wacana lingkungan hidup (*environmental discourse*) yang menjadi bahasan utama penelitian dan dipakai dalam kerangka penelitian ini.

F.1.1 Wacana (*discourse*)

Ada beragam konsep mengenai wacana. Dalam pengertian linguistik misalnya, wacana dipahami sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat (Eriyanto, 2001:3). Sedangkan konsep wacana yang diperkenalkan Michael Foucault (dalam Eriyanto, 2001:63) tak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks saja melainkan “sesuatu yang memproduksi yang lain” (sebuah gagasan, konsep atau efek). Dalam pendapat lain, Norman Fairclough mengaplikasikan konsep wacana dalam tiga cara berbeda:

“In the most abstract sense, discourse refers to language use as social practice.³...Secondly, discourse is understood as the kind of language used within a specific field, such as political or scientific discourse. And thirdly, in the most concrete usage, discourse is used as a count noun (a discourse, the discourse, the discourses, discourses) referring to a way of speaking which gives meaning to experiences from a particular perspective”. (seperti dikutip oleh Marianne Jorgensen dan Louise J. Phillips, 2002: 66-67)

Seperti yang dikemukakan pada pemahaman ketiga, Jorgensen dan Phillips menyimpulkan konsep *discourse* merujuk pada:

“...any discourse that can be distinguished from other discourses such as, for example, a feminist discourse, a neoliberal discourse, a Marxist discourse, a consumer discourse, or an environmentalist discourse”. (2002:67)

Melihat penjelasan Jorgensen dan Phillips di atas, sebuah wacana dapat dibedakan dengan wacana lainnya seperti misalnya wacana tentang feminisme, wacana neoliberalisme, hingga wacana environmentalisme atau wacana tentang lingkungan hidup.

³ Kutipan aslinya sesuai tercantum dalam buku *Media Discourse* adalah “ *A discourse is the language used in representing a given social practice from a particular point of view*” (Fairclough, 1995:56). Peneliti menerjemahkannya sebagai “pemakaian bahasa dalam merepresentasikan sebuah praktik sosial (*social practice*) dari sudut pandang tertentu”.

Dalam penggunaan terminologi *discourse* yang dilakukan oleh Michel Foucault, seperti yang diungkapkan Mary Talbot (2007:11), fokusnya tak hanya pada interaksi, sesuai dengan yang dikatakan atau dituliskan *tentang*: ide, pengetahuan, opini, keyakinan.⁴ Dalam perspektif semacam ini, Foucault menyatakan, “*discourses are structures of possibility and constraint; they are historically—constituted social constructions in the organization and circulation of knowledge*”. Contoh yang paling mudah dipahami untuk memahaminya adalah wacana tentang ilmu pengobatan (*medicine*). Foucault (dalam Talbot, 2007:11) menyebutnya sebagai “...*body of knowledge, practices and social identities that has developed historically*”. Wacana kesehatan mendefinisikan perihal kesehatan (*health*) dan penyakit (*sickness*). Suatu penyakit tertentu—sebagai sebuah obyek yang ditentukan oleh wacana—terdiri dari semua hal yang telah dikatakan atau dituliskan tentangnya. “*Medical discourse also determines who has the power to define, in the social identities it bestows, that is to say, it positions people as expert or not*”.

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa dalam segala bentuk wacana, akan selalu ada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan yang nantinya akan menentukan konsep yang harus diterima siapapun yang terlibat dalam wacana tersebut. Namun Foucault, dalam Talbot (2007:11), tidak menunjukkan kekuasaan sebagai alat yang digunakan kelompok yang berkuasa atau kuat (*powerful*) seperti misalnya kelompok penguasa atau kaum kapitalis tapi sebagai “*something circulated and deployed in discourse*”.

⁴ Kutipan aslinya berbunyi: “*Here the focus is not so much interaction, as what is spoken or written about: ideas, knowledge, opinions, beliefs*”. lihat Mary Talbot (2007:11)

Dari konsep tersebut, peneliti memahami bahwa kekuasaan dalam wacana sesungguhnya merupakan hal yang diterima secara wajar dalam masyarakat melalui proses perputaran (*circulated*) dan peredaran (*deployed*) yang secara sederhana dibahasakan sebagai sesuatu yang diterima begitu saja melalui proses pertukaran makna dan simbol. Peneliti juga memahami bahwa kekuasaan tidaklah selalu berhubungan dengan pihak yang terlihat memiliki wewenang, kuasa ataupun otoritas. Sebab dalam wacana, bentuk kekuasaan itu tidak terlihat. Maka yang harus dicari adalah akar wacana dari setiap persoalan yang ada. Bisa saja, pihak yang terlihat lemah justru membawakan wacana yang lebih dominan diterima daripada pihak sebaliknya.

Secara sederhana, berdasarkan pemahaman dari apa yang dikemukakan di atas, peneliti mengasumsikan wacana adalah sebuah percakapan atau pembicaraan mengenai suatu masalah dalam tema tertentu. Di dalamnya memuat berbagai topik bahasan namun merujuk pada satu tema utama yang menjadi wadah pembicaraan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dalam contoh di atas, wacana kesehatan misalnya, memiliki topik bahasan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyakit, keputusan mengenai tindakan kesehatan, dan sebagainya. Maka bisa diasumsikan bahwa wacana lingkungan hidup mencakup semua hal yang berkaitan dengan problem lingkungan hidup baik ide, cara pandang, maupun fakta sosiologis serta pihak-pihak pelibat wacana yang menyuarakan pendapatnya dalam wacana yang sama yakni wacana lingkungan hidup.

F.1.2 Persoalan Lingkungan Hidup

Setelah konseptualisasi wacana yang digunakan dalam penelitian, untuk lebih menjelaskan pemahaman mengenai lingkungan hidup, peneliti akan menjabarkan konseptualisasi persoalan lingkungan hidup. Menurut pemahaman yang tercantum dalam UU No.23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1, lingkungan hidup adalah:

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sementara Lynton Caldwell seperti dikutip oleh George Junus Aditjondro mendefinisikan persoalan atau masalah lingkungan hidup dalam gambaran berikut:

Masalah lingkungan merupakan hasil dari perubahan yang terjadi dalam lingkungan, yang disebabkan atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia, dengan konsekuensi menimbulkan keprihatinan sosial dan menciptakan problema yang mengarah kepada perlunya tindakan politik. (Aditjondro, 2003:164)

Maka, dengan merujuk pada pendapat-pendapat di atas, peneliti memahami wacana lingkungan hidup sebagai pembahasan atau pembicaraan mengenai setiap hal yang menyangkut persoalan lingkungan hidup. Di dalamnya terdapat beragam retorika dan kepentingan juga topik bahasan yang mengandung ide, opini, keyakinan dan pengetahuan yang semuanya berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup yang sedang dibicarakan.

F.1.3. Tiga Wacana Paradigma Lingkungan Hidup

Terkait fokus utama penelitian ini, mengenai analisis wacana lingkungan hidup, peneliti mengkategorikan beragam wacana yang muncul dalam kasus lingkungan hidup penambangan pasir besi Kulonprogo ke dalam tiga kategori besar yakni *eco-developmentalism*, *eco-fascism* dan *eco-populism*. Ketiga kategori besar wacana ini diperoleh dari pemahaman akan paradigma lingkungan hidup yang ada dalam kultur sosial dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pemahaman akan paradigma lingkungan hidup akan membantu menjelaskan bagaimana hubungan antar wacana-wacana tunggal yang terkadang tidak terlihat menyatakan persoalan lingkungan hidup menjadi sebuah jalinan kesatuan wacana lingkungan hidup yang utuh. Hal tersebut juga memudahkan peneliti memahami bagaimana representasi wacana lingkungan hidup yang ada dalam persoalan penambangan pasir besi Kulonprogo sebagai obyek analisa penelitian ini.

Wacana lingkungan hidup yang ada saat ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia dibentuk dari beragam cara pandang (paradigma) manusia dalam memperlakukan lingkungannya (*nature*). Secara umum, akar dari keseluruhan gerakan lingkungan hidup (*ecological movement*) dapat disebut sebagai sebuah ideologi politik “*that inform activity aimed at preventing damage to the natural environment by working in consensual ways*” (Sutton, 2007:166) yang dilatarbelakangi kesadaran masyarakat akan kedudukan planet bumi, politik lingkungan dan gerakan sosial.⁵

⁵ Neil Carter dalam bukunya *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy* (2007:xix) mendefinisikan environmentalisme modern (*modern environmentalism*) sebagai “*the emergence, from the late 1960s, of growing public concern about the state of the planet, new political ideas about the environment and a mass political movement*” disini dapat diasumsikan bahwa Carter

Dalam perkembangannya, muncul gerakan-gerakan lingkungan yang dipengaruhi filosofi atau paradigma lingkungan hidup yang memiliki orientasi masing-masing sebagai berikut:

a. Eco-developmentalism

Fokus gerakan lingkungan ini adalah mengupayakan kelestarian lingkungan demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemupukan modal (Fakih dalam Dietz, 1998: x). Alasan pelestarian lingkungan yang dipahami kelompok ini adalah demi kontinuitas pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung.⁶ Mansour Fakih juga menjabarkan bagaimana praktik kapitalisme ini berlangsung:

Dalam praktik kapitalisme--sebagai ideologi yang bertujuan melakukan pemupukan modal (capital accumulation) melalui proses-proses penanaman modal (capital investment)--mendorong dan mengharuskan adanya ekspansi keluar dalam bentuk penguasaan pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin". (Fakih dalam Dietz, 1998: vi)

Proses ini jugalah yang dianggap oleh Mansour Fakih sebagai penyebab munculnya sejarah imperialisme (penaklukan) dan kolonialisme (penjajahan).

Sebab dengan mengutamakan sumberdaya alam sebagai aset produksi, kelestarian lingkungan hidup hanya diusahakan sepanjang memiliki manfaat bagi pertumbuhan ekonomi atau modal. (Fakih dalam Dietz, 1998: vi)

Bisa dikatakan gerakan lingkungan yang merupakan perwujudan kapitalisme ini lahir dari pandangan antroposentrisme, sebuah paradigma yang diartikan Carter

mendefinisikan gerakan lingkungan juga sebagai gerakan politik yang berorientasi pada lingkungan.

⁶ Manosur Fakih (dalam Dietz, 1998: v-x) dengan tegas menyatakan bahwa gerakan ini memiliki akar kapitalisme "...sumber daya alam telah menjadi faktor penting sejak awal perkembangan kapitalisme. Dalam teori ekonomi kapitalis, sumber daya alam dianggap salah satu dari tiga faktor produksi yang utama, selain sumber daya manusia dan sumber daya dana"

Neil (2007:14) sebagai paradigma “*that regards humans as the source of all value and its predominantly concerned with human interest*”. Paradigma ini mengukuhkan keberadaan manusia sebagai makhluk tertinggi dalam hubungannya dengan alam, sehingga dengan demikian, memiliki hak untuk mengelola dan mengeksploitasi alam ini.⁷

Ide tentang pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang saat ini merupakan pedoman utama arah pembangunan negara-negara berkembang sesuai pedoman Bank Dunia (*World Bank*) disebut-sebut sebagai produk turunan dari paradigma ini.⁸

a. *Eco-Fascism*

Paradigma ini justru berkebalikan dengan *Eco-developmentalism*. Pusat dari paradigma ini adalah alam, sehingga tujuan utamanya adalah kelestarian alam dengan mengabaikan keberadaan manusia yang juga bagian dari alam. Ton Dietz mengatakan bahwa penganut ekofasisme cenderung melakukan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan. “Kaum ekofasis menganggap konservasi lingkungan jauh lebih penting daripada kehidupan rakyat, khususnya kehidupan rakyat miskin” (Dietz, 1998:22). Kaum ini, menurut Dietz, menganggap bahwa memang tidak terelakkan kalau rakyat harus dipindahkan dari

⁷ Sonny Keraf, dalam bukunya *Etika Lingkungan* secara jelas menyebut *antroposentrisme* sebagai biang keladi sikap manusia saat ini, “...Krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris...menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya,tanpa cukup memberi perhatian pada kelestarian alam.” (2002: 33-35)

⁸ Mansour Fakih adalah salah satu yang menyebut *sustainable development* sebagai kamufase untuk melestarikan kapitalisme.“Semboyan seperti pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan untuk mengabsahkan (melegitimasi) pertumbuhan dan pembangunan kapitalis” (Fakih dalam Dietz, 1998;x)

daerah-daerah yang terancam rusak. Mereka tidak peduli ke mana rakyat harus dipindahkan (Dietz, 1998:22).

Meski demikian, apa yang dipaparkan Dietz di atas merupakan penjelasan atas pemahaman ekototaliter. Konsep ini muncul akibat persoalan lingkungan hidup saat ini telah mendekati skala besar dan mendesak kuat hingga kepemimpinan yang otoriter dan teknokratis diperlukan (Dietz, 1998:19). Pendekatan ini memandang perlunya kepemimpinan penuh satu badan supranasional yang memberlakukan rezim lingkungan hidup di mana pun di seluruh dunia. Badan tersebut bisa PBB atau konglomerasi ORNOP lingkungan yang tersebar di seluruh dunia (Dietz, 1998:19-20). George Junus Aditjondro mencontohkan praktik ekofasisme yang lunak dengan kasus pelarangan yang dilakukan pemerintah pada warga yang digusur di sekitar Kedungombo untuk menggarap “sabuk hijau” waduk itu dengan menggunakan retorika hukum (legalistik) dan saintifik.⁹

Dari pemaparan di atas, peneliti memahami *eco-fascism* sebagai keberpihakan yang utuh terhadap lingkungan hidup dan cenderung menomorduakan kepentingan ekonomis maupun kepentingan masyarakat. Namun dalam konsep penelitian ini, peneliti menggunakan kategori ekofasisme untuk menunjukkan

⁹ Dalam contoh kasus pengusuran warga pada proyek waduk Kedungombo, Aditjondro menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan retorika (wacana) legalistik dan saintifik untuk mengabsahkan keputusannya. Dikatakan, pemerintah menggunakan UU Pokok Pengairan No. 11 th. 1974 untuk memutuskan bahwa keberadaan pemukiman rakyat di sekitar sabuk hijau waduk tersebut harus digusur. Selain itu pejabat PU dan pemerintah daerah mengatakan, keberadaan rakyat di kawasan periferi waduk tersebut akan menimbulkan erosi yang akan menimbulkan sedimentasi. Aditjondro sendiri sudah mengkaji ulang kedua wacana tersebut dan membuktikan sebaliknya. (Lihat Aditjondro, 2003:52-53) Meskipun dikatakan tindakan pemerintah itu adalah bukti dari ekofasisme “lunak” seperti yang dikatakan Aditjondro, peneliti cenderung melihatnya sebagai salah satu dalih pemerintah yang mengkamufleskan “penghijauan” sebagai alasan kepentingan yang sifatnya ekonomis.

intensi wacana yang sangat kuat mengarah pada wacana pelestarian lingkungan dengan mempertimbangkan data-data yang bersifat ilmiah (saintifik).

b. Eco-Populism

Berbeda dengan kelompok dalam dua paradigma di atas, kelompok yang memiliki pandangan ini adalah aktivis gerakan lingkungan yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (Fakih dalam Dietz, 1998: xi). Sehingga, kelompok ini juga dapat dinamai sebagai kelompok lingkungan kerakyatan.

“Kepentingan utama paradigma ini adalah memikirkan secara kritis siapa yang berhak atas lingkungan atau sumber daya alam dalam kawasan tersebut, siapa yang mendapat manfaat dari lestarnya alam di sana. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara perlahan kelompok paradigma ini mentransformasikan dirinya menjadi gerakan politik” (Fakih dalam Dietz, 1998: xi).

Kaum Ekopopulis kuat menekankan pentingnya pengalaman-pengalaman orang-orang lokal dan inovasi-inovasi keliru yang diperkenalkan dari luar (Dietz, 1998:40). Terkait lingkungan, menurut Dietz, kaum tersebut menekankan pada pentingnya pengetahuan lama yang diwariskan dari generasi ke generasi itu (Dietz, 1998:40). Di sisi lain, juga ada pendekatan kedua yang disebut Ekopopulisme Lemah (*Weak Ecopopulism*) (Dietz, 1998:41). Pandangan kedua ini menganggap pengetahuan rakyat menjadi sama pentingnya dengan apa yang disebut pengetahuan ilmiah, perbedaan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan rakyat sebagai sesuatu yang sah tidak lagi dianggap (Dietz, 1998:41). Meski berbeda, Dietz memaparkan bahwa sesungguhnya kedua pendekatan tersebut, Ekopopulisme kuat dan Ekopopulisme lemah sama-sama mengidealisasikan masyarakat-masyarakat lokal:

Mereka cenderung berpendapat bahwa partisipasi dari semua warga masyarakat adalah mungkin dan merupakan kunci untuk menemukan pemecahan masalah. Mereka pun cenderung menjauh dari ekonomi yang lebih besar. (Dietz, 1998:44)

Wacana lingkungan hidup yang tampak dalam realitas sosiologis maupun pemberitaan media diasumsikan akan memperlihatkan atau membawa kepentingan dan muatan filosofis dari ketiga paradigma lingkungan hidup ini. Dalam medan wacana terdapat pertarungan wacana (*discourse struggle*) untuk mengukuhkan dominasi yang satu dan memarjinalkan yang lain. Demikian pula dalam medan wacana lingkungan hidup, ada kemungkinan salah satu dari ketiga wacana lingkungan hidup di atas akan tampil sebagai wacana dominan dalam sebuah masyarakat dan konstruksi wacana media.

F.1.4. Koalisi Wacana Lingkungan Hidup

Peneliti merasa perlu menjelaskan mengenai konsep koalisi wacana (*discourse coalition*) untuk lebih membantu memahami pemetaan wacana lingkungan hidup yang ada dalam pemberitaan pasir besi Kulonprogo dalam fokus penelitian ini. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, konseptualisasi wacana lingkungan hidup peneliti bagi menjadi tiga yakni *eco-developmentalism*, *eco-fascism*, dan *eco-populism*. Namun kenyataannya, setiap pendapat, ide, pandangan yang dikemukakan oleh setiap pelibat wacana (*tenor of discourse*) juga dapat dikatakan sebagai wacana. Ada kemungkinan wacana-wacana itu menjadi *overlapping* atau saling tumpang-tindih sehingga tak dapat dilihat secara langsung intensi wacananya.

Pertanyaannya, bagaimana menemukan benang merah yang menghubungkan kepentingan wacana satu sama lain dalam tema yang lebih besar yakni wacana lingkungan hidup seperti yang peneliti kemukakan di atas?

Konsep koalisi wacana diperkenalkan oleh Maarten A. Hajer yang menganalisa kasus hujan asam (*acid rain*) di Inggris. Hajer seperti dikutip oleh Heidi Wittmer and Regina Birner (2005:3) menganalisa peran *story-line* dan koalisi wacana dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan (*environmental policies*). Ia mendefinisikan sebuah *story-line* sebagai turunan naratif dalam realitas sosial “*through which elements from many different domains are combined and that provide actors with a set of symbolic references that suggest a common understanding*” (Hajer dalam Wittmer dan Birner, 2005:3-4). Peneliti memahami koalisi wacana sebagai kombinasi wacana-wacana yang memiliki pemahaman yang sama dengan satu hal tertentu meskipun pada kenyataannya tenor-tenor wacana tersebut saling berkonflik.

Hajer (dalam Wittmer and Birner 2005:5) menunjukkan bahwa sebuah *story-line* pada dasarnya bekerja sebagai sebuah metafor, “*because by uttering a specific element, the speaker can effectively invoke the storyline as a whole*”. Pemakaian dari instrument politik yang ditunjukkan oleh *story-line* tertentu dan kebutuhan para aktor (pelibat wacana) untuk, berdasarkan *story-line* tersebut, melegitimasi argumen mereka dilihat sebagai indikasi hegemoni diskursif.¹⁰

Dari hal yang dikemukakan di atas, peneliti beranggapan bahwa wacana tertentu akan makin diakui dan dikukuhkan jika orang/pelantun wacana

¹⁰ Peneliti menerjemahkan dari pernyataan Hajer “*The adoption of policy instruments implied by a certain story-line and the need of actors to refer to this story-line to legitimize their arguments are seen as indications of discursive hegemony*” Lihat Wittmer and Birner (2005:5)

merupakan pihak yang kredibel. Hal ini biasanya diwakili oleh pakar, akademisi, praktisi atau juga sumber-sumber *official* seperti Kepala Dinas Departemen Pemerintahan tertentu, Direktur LSM tertentu, dan sebagainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heidi Wittmer and Regina Birner tentang kebijakan biodiversitas (*biodiversity policy*) di Thailand dan Indonesia, 2005, ada tiga wacana utama yang muncul dari persoalan tersebut yaitu *conservationism*, *eco-populism*, dan *developmentalism*. Di situ Wittmer dan Birner menganalisa setiap wacana dari *proponents of the discourse*, *story-lines*, dan *relation to other discourses*.

Proponents of the discourse dapat diasumsikan sebagai pelibat wacana atau pelantun wacana dan peranan mereka dalam wacana tersebut, misalnya wacana *conservationist* di Indonesia diwakili oleh Dinas Kehutanan dan LSM yang berorientasi pada usaha konservasi. Sementara *story-line* yang terdapat dalam wacana *conservationism* adalah deforestasi yang disebabkan oleh perusakan fungsi pengairan hutan dengan menggunakan air permukaan. Sementara hubungan dengan wacana yang lebih umum adalah hubungan kuat antara wacana *conservationism* dengan wacana nasionalis di Thailand. Hal ini, menurut Wittmer dan Birner (2005:12) karena latar belakang sejarah Thailand dimana ahli kehutanan Inggris menyatakan hutan sebagai simbol nasional sehingga harus dilindungi pada akhir abad 19.

Peneliti menganggap ilustrasi di atas sebagai hubungan kait-mengkait antara wacana yang satu dengan wacana yang lain. Meski disuarakan oleh pelantun wacana yang berbeda, wacana-wacana tersebut sebenarnya bergabung dalam satu

inti wacana yang lebih besar. Maka, bisa saja meski saling bertentangan dalam realitas sosiologis, para pelibat wacana sebenarnya menyuarakan wacana yang sama atau memiliki kesamaan intensi wacana. Wacana tersebut mengalahkan wacana lain sehingga menjadi dominan dalam medan wacana. Inilah yang direpresentasikan media melalui pemberitaannya yang membingkai realitas sosiologis yang ada.

Konsep koalisi wacana ini akan membantu peneliti saat menganalisa wacana-wacana yang muncul pada teks berita untuk mengelompokkannya ke dalam koalisi yang memiliki kesatuan ide atau proses. Dalam hal ini koalisi wacana yang dimaksud adalah ketiga jenis wacana lingkungan hidup yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya.

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan bagaimana konseptualisasi konstruksi wacana lingkungan hidup dalam media massa untuk memperjelas peran media dalam mengkonstruksi dan merepresentasikan wacana lingkungan hidup dalam pemberitaannya.

F.2. Media Massa dan Konstruksi Wacana Lingkungan Hidup

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana representasi wacana lingkungan hidup (persoalan penambangan pasir besi Kulonprogo) dalam pemberitaan surat kabar lokal (*Harian Jogja*). Istilah representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001: 113-114). Persoalan utama dalam representasi adalah bagaimana realitas atau obyek tersebut ditampilkan.

John Fiske seperti yang dikutip oleh Eriyanto (2001 :114-115) menyebutkan bahwa ada tiga proses yang dihadapi oleh wartawan dalam menampilkan obyek, gagasan, kelompok atau seseorang yaitu:

1. Realitas

Bagaimana wartawan mengkonstruksi sebuah peristiwa sebagai suatu realitas. contoh: pengeboman dianggap sebagai realitas karena mendengar suara bom.

2. Representasi terhadap realitas

Wartawan menggunakan kemampuan teknis untuk menggambarkan realitas tersebut. Dalam bahasa tulis, alat teknis itu adalah kata, kalimat, grafik dan sebagainya.

3. Ideologi

Bagaimana wartawan mengorganisir peristiwa ke dalam konvensi-konvensi yang diterima secara ideologis seperti kelas sosial dan kepercayaan dominan dalam masyarakat (patriarki, kapitalisme, dan sebagainya) (Eriyanto, 2001 :114-115)

Ketiga hal yang disebutkan Fiske tersebut merupakan bagian dari pekerjaan utama seorang wartawan yakni kegiatan jurnalistik. Hasil dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan tersebut adalah bagian dari rutinitas media massa yang menghasilkan produk jurnalistik berupa berita.

Surat kabar adalah salah satu bentuk media massa yang menjalankan fungsi pers yakni memberikan informasi dalam bentuk berita pada khalayak. Sementara dalam paradigma kritis, berita tak dipahami sekedar sebagai produk jurnalistik

tapi juga hasil konstruksi atas realitas yang dilakukan oleh media. Realitas tersebut dibingkai kemudian dihadirkan kembali dalam wujud pemberitaan. Dalam tabel perbandingan yang dikemukakan Eriyanto (2001:32) dijelaskan bahwa berita dalam pandangan kritis tidak mungkin merupakan cerminan dan refleksi realitas, karena berita yang terbentuk hanya cerminan dari kepentingan kekuatan dominan. Dari pemahaman tersebut, terlihat bahwa pandangan kritis menganggap berita bukanlah produk jurnalistik yang bebas nilai. Ia merupakan cerminan dari nilai-nilai dominan yang ada dalam masyarakat maupun institusi media.

Ibnu Hamad (2004:11) mengatakan, proses konstruksi realitas pada prinsipnya adalah upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksikan realitas.¹¹ Terkait dengan hal itu, Hamad juga menyebutkan bahwa konstruksi realitas adalah pekerjaan utama media massa.

Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas...Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. (Hamad, 2004:11).

Dari pendapat Hamad, kita dapat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh media juga dapat dilakukan sebagai usaha mengkonstruksikan wacana. Hasil dari konstruksi wacana oleh media adalah berita. Dengan demikian, berita dapat dianggap atau dimaknai sebagai wacana media. Seperti dikutip oleh Ibnu Hamad (2004:22, catatan kaki), Teun A. Van Dijk jelas-jelas menyatakan berita sebagai

¹¹ Hamad mencontohkan laporan mengenai kegiatan orang banyak berkumpul di lapangan terbuka mendengarkan pidato politik pemilu sebagai hasil konstruksi realitas atas apa yang lazim disebut sebagai kampanye pemilu. Lihat Hamad (2004:11)

wacana. Maka dengan demikian, pemberitaan dapat dikatakan sebagai hasil konstruksi media yang merepresentasikan wacana media itu sendiri.

F.2.1. Representasi Wacana

Istilah ‘representasi’ merupakan kosakata yang sering muncul dalam analisis wacana. Secara sederhana, kata ini bisa diterjemahkan sebagai: perbuatan yang mewakili, sesuatu yang diwakili (KBBI, 1989:744). Kata ini juga merupakan serapan dari bahasa Inggris ‘*re-present*’ yang berarti; mempersembahkan lagi atau menghadirkan kembali. Terkait dalam konsep wacana pemberitaan sebagai hasil konstruksi media, maka wacana media juga bisa dianggap sebagai representasi wacana yang ada pada realitas sosial.

Eriyanto (2001:113) menunjukkan bahwa istilah representasi sendiri menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Menurutnya lagi, representasi ini penting untuk memperlihatkan apakah seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tadi ditampilkan sebagaimana mestinya dimana ada faktor citra baik dan buruk yang terlibat. Sementara yang kedua adalah dengan cara apa atau bagaimana representasi itu (seseorang, kelompok, gagasan) ditampilkan. Misalnya dengan kata, kalimat, aksentuasi, atau foto (Eriyanto, 2001:113).

Media memaknai realitas dengan cara memilih dan menuliskan fakta (Eriyanto, 2001:116). Pada proses memilih ada perspektif si wartawan yang dilibatkan, sementara pada proses menuliskan fakta ada faktor cara penyajiannya. Aspek memilih fakta ini tidak terlepas dari bagaimana fakta tersebut dipahami oleh

media. Sehingga, proses pemilihan fakta ini hendaknya tidak dipahami semata sebagai bagian teknis jurnalistik, tetapi juga praktik representasi (Eriyanto, 2001:116-118).

Jika pemahaman dalam konsep representasi yang dipaparkan oleh Eriyanto lebih memaknai representasi sebagai proses kehadiran atau penggambaran aktor (seseorang, kelompok), peneliti lebih mengambil pendekatan dari sisi kehadiran gagasan atau ide. Dalam penelitian ini, representasi wacana lingkungan hidup dipahami sebagai kehadiran kembali paradigma lingkungan hidup dalam berita yang memuat isu lingkungan hidup. Bagaimana paradigma terhadap lingkungan hidup, yang ada dalam setiap persoalan lingkungan hidup, dipahami dan dihadirkan kembali (*re-present*) oleh media melalui teks yang dihasilkannya. Saat membicarakan aktor atau pelantun wacana, yang ditonjolkan **bukanlah siapa aktor tapi apa** yang disuarakan si aktor. Dengan memilih kutipan narasumber tertentu, sebenarnya juga bisa dipandang sebagai pemilihan media untuk merepresentasikan wacana tertentu (dengan meminjam wacana si aktor). Wacana tertentu bisa saja dihadirkan oleh pelantun tertentu secara kontinyu, namun sesuai sifat realitas sosial yang dinamis, wacana tertentu itu tadi bisa juga disuarakan oleh pelantun wacana yang berbeda. Dalam penelitian ini pula, peneliti berharap bisa melihat juga wacana dominan seperti apa yang ada dalam realitas sosial yang kemudian mempengaruhi cara pandang media dalam melakukan pemilihan dan penulisan fakta.

F.2.2. Order of Discourse

Karena bentuk wacana hasil konstruksi media adalah berita, maka peneliti memilih *order of discourse* yang ada dalam pemberitaan tersebut untuk digunakan dalam penelitian ini. *Order of discourse* dipahami secara sederhana layaknya pakaian (Eriyanto, 2001:288).¹² Peneliti memahami *order of discourse*, berdasarkan penjabaran yang diberikan Eriyanto sebagai bentuk berita atau bentuk tampilan teks dalam media. Dalam penelitian ini, peneliti memilih **Tajuk** atau Editorial dan **Liputan Khusus** atau *Depth News Report* sebagai *order of discourse* penelitian.

a. Tajuk atau Editorial

Haris Sumadiria (2005:7) mendefinisikan Tajuk Rencana atau editorial sebagai “Opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat.” Dikatakannya pula bahwa opini yang ditulis pihak redaksi ini diasumsikan mewakili dan mencerminkan pendapat dan sikap resmi media pers yang bersangkutan secara keseluruhan. Karena merupakan suara lembaga, maka tajuk rencana tidak mencantumkan nama peneliti (Sumadiria, 2005:7).

Karena tajuk rencana bisa dikatakan sebagai pendapat resmi media, maka peneliti memilih tajuk rencana *Harian Jogja* dengan asumsi bahwa wacana media

¹² Dalam catatan kakinya, Eriyanto (2011:289) mengatakan bahwa bentuk *order of discourse* dalam teks berita bisa berupa artikel, editorial, *hardnews* atau *feature*. Dikatakan, bentuk tersebut merupakan pendisiplinan wacana. Perbedaan praktik diskursif yang berbeda akan menghasilkan struktur wacana yang berbeda pula. Proses produksi dan konsumsi serta konteks situasi di mana teks tersebut dihasilkan tentunya juga akan berbeda. Misalnya saja, editorial bermuatan opini sementara berita bersifat faktual dan sebisa mungkin obyektif.

sebagai hasil praktik jurnalisme dalam wacana persoalan penambangan pasir besi Kulonprogo akan “terbaca” melalui analisis teks tajuk tentang kasus itu.

b. *Depth Report* dalam bentuk Liputan Khusus

Depth Report memiliki perbedaan dengan *straight news* yang hanya menampilkan fakta secara singkat karena mengutamakan waktu. Sumadiria (2005:70) menyatakan bahwa *Depth Reporting* bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam ini sering disajikan dalam rubrik khusus seperti laporan utama, bahasan utama. Atau fokus. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejenuhan pembaca dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyiapkannya serta dikerjakan oleh tim.

F.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konstruksi Wacana Lingkungan Hidup dalam Media Massa

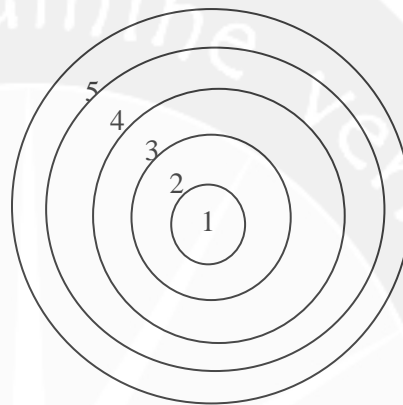
Berita sebagai hasil konstruksi wacana, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bukanlah produk yang bebas nilai. Berita tidak netral apa adanya. Ia dibentuk oleh bermacam nilai, pendapat, keyakinan yang ada pada diri wartawan, institusi media itu sendiri juga eksternal media. Seperti yang dikemukakan oleh Hamad (2004:25), “media massa tidak hidup dalam situasi yang vakum. Struktur dan penampilan media ditentukan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal”.

Dalam menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi proses produksi berita, peneliti melihatnya sebagai konstruksi wacana lingkungan hidup dalam pemberitaan, oleh media massa, Pamela Shoemaker dan Stephen Reese menampilkan sebuah model hirarki institusi media:

GAMBAR 1
Pengaruh Pada Hirarki Institusi Media

Keterangan:

1. *Individual level*
2. *Media routine level*
3. *Organization level*
4. *Extramedia level*
5. *Ideological level*



Sumber: Shoemaker and Reese (1996:141)

Level paling dalam dari kelima level hirarki institusional yang mempengaruhi konstruksi wacana seperti tampak dalam bagan di atas adalah level individu (*individual level*). Level ini merujuk pada individu perorangan yang melakukan pekerjaan jurnalistik yaitu wartawan, redaktur, editor, dan lain-lain dalam sebuah institusi media. Namun, wartawan atau reporterlah yang dapat dikatakan sebagai ujung tombak media dalam melakukan peliputan isu dan pembuatan laporan. Mereka menentukan *angle* pemberitaan, mencari data dan menentukan narasumber untuk diwawancarai saat di lapangan. Shoemaker dan Reese (1996:64) menyebut jurnalis sebagai komunikator (*communicator*) untuk menunjukkan peran mereka dalam pembuatan isi media (*media content*). Dalam sebuah bagan,

Shoemaker dan Reese (1996:65) menunjukkan faktor-faktor intrinsik (internal) individu yang mungkin mempengaruhi *media content* atau dalam hal ini, pengkonstruksian wacana lingkungan hidup yakni:

1. *Characteristics, personal background, and experiences*
2. *Professional backgrounds and experiences*
3. *Professional roles and ethics*
4. *Personal attitudes, values, and beliefs*
5. *Power within the organization*

Preferensi nilai-nilai, latar belakang, pendidikan, pengalaman hidup serta etika, pengalaman profesionalnya juga kedudukannya dalam institusi media adalah bagian dari seorang jurnalis. Keseluruhan faktor intrinsik ini akan mempengaruhi bagaimana seorang jurnalis suatu institusi media, akan memandang sebuah realitas dan melakukan konstruksi atas wacana.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh John Fiske di atas, seorang jurnalis melalui tiga proses (realitas, representasi, ideologi) saat melakukan representasi terhadap suatu realitas atau mengkonstruksikan wacana. Maka, unsur-unsur intrinsik yang disebutkan oleh Shoemaker dan Reese dapat dikatakan juga turut mempengaruhi ketiga proses yang dilalui seorang jurnalis dalam melakukan konstruksi terhadap wacana. Nilai-nilai yang dipegang, latar belakang personal, latar belakang pendidikan dan pandangan politik serta posisi seseorang dalam media akan mempengaruhi bagaimana suatu wacana dikonstruksikan dalam pemberitaan. Level ini akan membantu merumuskan dasar-dasar analisa dalam *discourse practice* terutama pada produksi teks yang dilakukan oleh media massa.

Selanjutnya adalah level rutinitas media (*media routines*) yang melingkupi *individual level*. Bagaimanapun, jurnalis atau pekerja media merupakan bagian dari sebuah sistem kerja jurnalistik yang dimiliki oleh institusi media. Setiap media, belum tentu memiliki rutinitas media yang sama. Namun sangat jelas bahwa sistem kerja yang dijalankan sebuah institusi media memiliki pola yang teratur atau yang disebut Shoemaker dan Reese (1996:105) sebagai “...*repeated practices and forms that media workers use to do their jobs*”. Dalam suatu sistem kerja yang sudah terpola dan sistematis, media juga memiliki rutinitas praktik jurnalistik yang mereka jalankan.

Karena media adalah sebuah institusi yang diharapkan menghasilkan profit, maka mereka berusaha untuk menghasilkan produk yang bisa dijual dan mendatangkan keuntungan (Shoemaker dan Reese, 1996:109). Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa media memiliki sifat oportunistik dengan memanfaatkan produknya, yakni berita, agar dapat memperoleh keuntungan. Dengan demikian, rutinitas media memiliki ketiga hal yang harus dipertimbangkan yaitu: *sources (suppliers)*, *media organizations (producers)*, dan *audience (consumers)* (Shoemaker dan Reese, 1996:116). Media harus mempertimbangkan apa yang bisa diterima oleh konsumen (khalayak), kemampuan media untuk memproduksi dan bahan baku apa yang tersedia (contoh: peristiwa yang bisa jadi berita). Dengan demikian, sebuah institusi media juga mempertimbangkan nilai berita yang terdapat dalam suatu peristiwa agar dapat memenuhi permintaan khalayak. Nilai berita tersebut antara lain: *prominence/importance*, *human interest*, *conflict/controversy*, *the unusual*, *timeliness*, dan *proximity* (Shoemaker dan

Reese, 1996:111). Keseluruhan nilai berita ini terdapat dalam setiap ranah peristiwa atau realitas sosiologis. Nilai-nilai berita tersebut ada pada tema-tema realitas sosiologis seperti kebudayaan, kebijakan politik dan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Dengan adanya tema realitas sosiologis yang berbeda-beda, dapat kita asumsikan bahwa media juga melakukan praktik jurnalistik yang sesuai dengan tema atau *beat* peliputan suatu peristiwa. Misalnya saat melakukan peliputan konflik, media menggunakan pendekatan praktik jurnalisme damai sebab ia berusaha senetral mungkin melakukan pemberitaan. Jurnalisme lingkungan hidup juga dapat dikatakan sebagai suatu praktik jurnalistik yang dilakukan oleh media jika terkait dengan *beat* pemberitaan mengenai persoalan lingkungan hidup.

Seperti yang telah disinggung di latar belakang, jurnalisme lingkungan hidup diharapkan berpihak pada kesinambungan lingkungan hidup. Dimana pemberitaannya diorientasikan kepada pemeliharaan lingkungan hidup. M. Frome seperti yang dikutip oleh Lisa Rademakers (2004:6), mendefinisikan jurnalisme lingkungan hidup sebagai “*writing with a purpose, designed to present the public with sound, accurate data as the basis of informed participation in the process of decision making on environmental issues*”. Jurnalisme lingkungan hidup harus memiliki tujuan dan keakuratan data dalam usahanya mendukung pengambilan keputusan. Dalam hal ini tentunya sikap masyarakat terhadap realitas persoalan lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka.

Bagi Frome, jurnalisme lingkungan hidup berbeda dengan jurnalisme tradisional. Jurnalisme lingkungan hidup lebih dari sekedar meliput dan menulis,

namun juga mewakili sebuah cara hidup, cara memandang dunia dan diri sendiri. Jurnalisme lingkungan hidup diawali dengan konsep pelayanan publik, memberikan dukungan pada perjuangan dan kebutuhan dan didasari dengan kejujuran, kredibilitas dan tujuan.¹³

Dari gambaran tersebut, jurnalisme lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu institusi media tak dapat didasarkan hanya semata pada kewajiban praktis media melakukan peliputan isu-isu lingkungan hidup. Media, dalam hal ini juga diharapkan memiliki nilai-nilai dan tujuan yang membawa arah pemberitaan lingkungan hidupnya pada suatu usaha advokasi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Mengenai arah wacana lingkungan hidup yang dibawa oleh media akan disinggung kemudian.

Level selanjutnya yang lebih besar dari *media routines* adalah *organizational level*. Dalam sebuah organisasi media, tak hanya bagian keredaksian saja yang memiliki peran namun juga bagian usaha seperti iklan dan pemasaran. Setiap peran yang dijalankan oleh individu sesuai tanggung jawabnya menentukan pandangan mereka. Shoemaker dan Reese (1996:151) mengatakan bahwa peran seseorang “*shape their orientation toward organizational issues by providing a distinct vantage point on and stake in decisions*”. Meskipun kerja utama suatu institusi media adalah menjalankan kerja jurnalistik, namun kompleksitas struktur organisasi yang dimilikinya dapat mempengaruhi proses konstruksi wacana yang

¹³ “*Environmental journalism differs from traditional journalism. It plays by a set of rules based on a consciousness different from the dominant in modern American society. It is more than a way of reporting and writing, but a way of living, of looking at the world, and at oneself. It starts with a concept of social service, gives voice to struggle and demand, and comes across with honesty, credibility, and purpose. It almost always involves somehow, somewhere, risk and sacrifice*” (Frome, 1998: 21 dalam Rademakers, 2004:16)

dilakukannya. “...*the larger and more complex the firm, the more likely that larger organizational factors will prevail over individual and routine influences*” (Shoemaker dan Reese, 1996:158). Sebagai contoh, faktor kepemilikan sebuah media dapat ikut menentukan bagaimana konstruksi wacana yang dilakukan oleh media yang bersangkutan.¹⁴ Dalam level organisasi juga dapat terlihat kebijakan redaksional seperti apa yang dijalankan oleh sebuah media saat menyangkut persoalan tertentu.

Level selanjutnya adalah *extramedia level*. Bagian ini menyertakan unsur-unsur ekstrinsik di luar media sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses konstruksi wacana media. Shoemaker dan Reese (1996:175) menyebutkan faktor-faktor ini berupa sumber informasi (*the sources of information*) yang menjadi isi media seperti: kelompok kepentingan (*interest group*), kampanye kehumasan (*public relations campaign*), bahkan organisasi media (*news organizations*) itu sendiri; sumber modal seperti pengiklan dan khalayak; institusi sosial lain seperti kalangan bisnis dan pemerintah; serta lingkungan ekonomi (*the economic environment*); dan teknologi. Bagaimanapun, sebuah institusi media merupakan bagian dari masyarakat dan struktur ekonomi yang lebih luas. Maka ia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya.¹⁵

Sedangkan level terluar yang mempengaruhi kesemua level adalah level ideologi (*ideological level*). Ideologi di sini tak dipahami sebagai hal yang terkait

¹⁴ Contoh yang sangat terlihat pada media massa Indonesia adalah saat Surya Paloh selaku owner dari *Media Group* mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar beberapa saat lalu. *Metro TV* sebagai salah satu organisasi media yang dimilikinya, nyaris tak pernah memberitakan perihal saingannya Aburizal Bakrie yang juga memiliki media *TV One*.

¹⁵ Sebagai contoh institusi-institusi di luar media yang turut mempengaruhi isi media atau hasil konstruksi wacana media adalah Dewan Pers sebagai otorisasi kerja jurnalistik, pengamat media, kebijakan pemerintah terkait kerja dan kedudukan pers, juga arus modal dari pengiklan, pemegang saham dan lain-lain.

dengan sistem kepercayaan (*belief system*) perorangan. “*Rather, ideology represents a societal-level phenomenon*” (Shoemaker dan Reese, 1996:222). Peneliti memahami bahwa menginterpretasikan ideologi seperti apakah yang mempengaruhi konstruksi wacana dalam penelitian ini tak mungkin dilakukan dengan menyeluruh. Hal ini merupakan salah satu keterbatasan penelitian yang disadari oleh peneliti sebab tidaklah mudah untuk menganalisa level ini secara komprehensif. Dibutuhkan metode tersendiri dan juga level yang lebih luas jika ingin memahami ideologi seperti apa yang ada dan mempengaruhi suatu media melakukan konstruksi wacana. Namun peneliti mengasumsikan dapat melihatnya dari gabungan-gabungan analisa faktor di luar media seperti kebijakan pemerintah, pedoman jurnalistik, kebijakan redaksional, visi misi media dan tinjauan historis media maupun pers Indonesia pada umumnya.

Dari keseluruhan konseptualisasi kerangka teoritik yang telah peneliti kemukakan, terlihat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi proses konstruksi wacana media. Bahkan, level individu atau rutinitas media dapat “dikalahkan” oleh level organisasional dan ekstramedia, misalnya faktor kepemilikan media dan kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor pengaruh yang paling dekat untuk diamati adalah kepentingan ekonomi media. Tak dapat dipungkiri, media telah berkembang pesat menjadi industri yang “menjual” komoditas berupa pemberitaan. Sementara, ekonomi adalah faktor utama dari kapitalisme yang berorientasi pada profit, pertumbuhan usaha dan penambahan modal. Maka sangat mungkin, bahwa media juga condong untuk mengkonstruksikan wacana *eco-developmentalism*. Wacana ini, seperti

yang dikemukakan sebelumnya, memiliki orientasi pelestarian lingkungan hidup demi kepentingan industri dan ekonomi. Kemungkinan besar, hal-hal yang akan sering dimunculkan oleh wacana ini akan berkaitan dengan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan potensi alam dan sebagainya.

Penelitian yang telah dilakukan Heidi Wittmer dan Regina Birner dengan mengambil contoh kasus di Thailand dan Indonesia memang telah mengungkapkan ketiga wacana besar yang muncul dari persoalan lingkungan hidup ‘kebijakan biodiversitas’ yaitu *conservationism*, *eco-populism*, dan *developmentalism*, namun penelitian itu sama sekali tidak menyinggung peran media massa dalam melakukan konstruksi wacana lingkungan hidup tersebut.

Namun peneliti tetap dapat memanfaatkan kerangka berpikir penelitian tersebut untuk memetakan persoalan lingkungan hidup yang jadi fokus utama penelitian ini yaitu rencana penambangan pasir besi Kulonprogo. Dari tabel yang disertakan oleh Wittmer dan Birner (2005:9) peneliti dapat mengaplikasikan kata kunci yang sering muncul dalam wacana lingkungan hidup tersebut ke dalam penelitian ini.

G. Metodologi Penelitian

G.1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Rachmat Kriyantono (2006:69), jenis riset deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau obyek tertentu. Sementara sifat penelitian kualitatif menekankan pada persoalan kedalaman atau kualitas data bukan pada banyaknya atau kuantitas data. Maka hasil penelitian

kualitatif tidak bermaksud untuk membuat generalisasi dan juga lebih bersifat fleksibel (Kriyantono, 2006:86). Penelitian kualitatif lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi (Pawito, 2007: 35). Dalam penelitian ini, fleksibilitas dipahami sebagai kompromi terhadap segala macam kemungkinan yang bisa mengubah arah atau tujuan penelitian. Peneliti memang memiliki pegangan awal berupa kerangka teoritik dan asumsi-asumsi berdasarkan pengamatan awal. Namun hal tersebut dapat menyesuaikan keadaan di lapangan serta mempertimbangkan aspek yang tak terduga. Misalnya saja jika ada perubahan dalam jenis data, perubahan narasumber, penambahan metode, dan sebagainya. Meskipun menggunakan pedoman penelitian kualitatif sebagai pegangan utama arah penelitian, peneliti tidak menutup kemungkinan akan menggunakan sedikit gabungan metode penelitian kuantitatif untuk mendapatkan gambaran statistik. Peneliti bisa menggunakan proses kuantifikasi untuk menghitung data pemberitaan selama kurun waktu penelitian, hal ini akan membantu pemilahan dan pemetaan atas data-data tersebut.

G.2 Purposive sampling sebagai metode pemilihan teks

Logika pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Pawito (2007:86-87), penelitian kuantitatif lebih mengutamakan keterwakilan (*representativeness*) dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi, penelitian kualitatif lebih mengutamakan persoalan representativitas informasi atau data.

Lebih lanjut, Pawito (2007:88) mengatakan, teknik pengambilan sampel dalam penelitian komunikasi kualitatif lebih mendasarkan diri pada alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan tujuan penelitian. "Oleh karena itu, sifat metode sampling dari penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah *purposive sampling*" (Pawito, 2007:88). Sedangkan persoalan sampel meliputi dua hal yakni *sampling unit* dan *sampling techniques*. *Sampling unit* berkenaan dengan apa yang sesungguhnya hendak diwakili seperti orang-orang, seting, teks, peristiwa dan sebagainya sementara *sampling techniques* berhubungan dengan bagaimana menentukan siapa yang menjadi wakil (Pawito, 2007:90).

Dalam penelitian ini, yang menjadi *sampling unit* adalah teks-teks berita yang memuat persoalan rencana penambangan pasir besi Kulonprogo di *Harian Jogja*. Sementara pemilihan teks yang akan digunakan menggunakan metode *critical case sampling*. Sebenarnya teknik ini merupakan salah satu metode pemilihan yang biasanya digunakan dalam konteks orang atau manusia sebagai subjek atau sampel penelitian (Lindlof, 1995 dalam Pawito, 2007:90). Peneliti memakainya dengan alasan tujuan penggunaan metode ini lebih sering digunakan ketika peneliti bermaksud hendak menonjolkan keunikan yang ekstrim dilihat dengan menggunakan teori tertentu atau mungkin dilihat dari segi realitas praktis yang ada (Pawito, 2007:95).

Dengan penjelasan di atas, peneliti menggunakan pendekatan teknik ini untuk memilih teks yang akan digunakan sebagai obyek utama analisis yakni tajuk rencana dan berita liputan khusus. Seperti yang sudah dipaparkan dalam kerangka

teoritik, tajuk memiliki keunikan dari sifatnya yang lebih merupakan opini atau suara resmi media dalam menanggapi sebuah persoalan. Sementara berita liputan khusus ditinjau dari penempatan dan proses peliputannya memiliki kekhasannya sendiri. Berita liputan khusus dapat dipandang sebagai bentuk *depth-reporting* dalam artian, data yang disajikan lebih komprehensif, *angle* yang diangkat lebih bersifat luas dari berbagai aspek dan teksnya lebih panjang. Sehingga, peneliti berasumsi bahwa ketika sebuah isu diangkat sebagai topik liputan khusus, media pastilah memiliki ketertarikan "lebih" pada isu itu dibanding isu yang lain. Atas dasar ketertarikan, bukan tidak mungkin jika media juga mengkonstruksikan teksnya dalam kerangka berpikir wacana tertentu.

G.3 Obyek penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini wacana rencana penambangan pasir besi Kulonprogo yang direpresentasikan dalam tajuk dan liputan khusus rubrik Aktual *Harian Jogja*. Maka, obyek penelitian ini adalah tajuk rencana dan rubrik Aktual di media *Harian Jogja* yang memuat tentang pemberitaan rencana pembangunan proyek pertambangan pasir besi Kulonprogo selama periode waktu 1 Juni 2008 – 30 November 2009. Sementara subjek penelitian adalah jajaran *redaksi* *Harian Jogja* yang akan diminta konfirmasi atas hasil analisis teks dan level *discourse practice*.

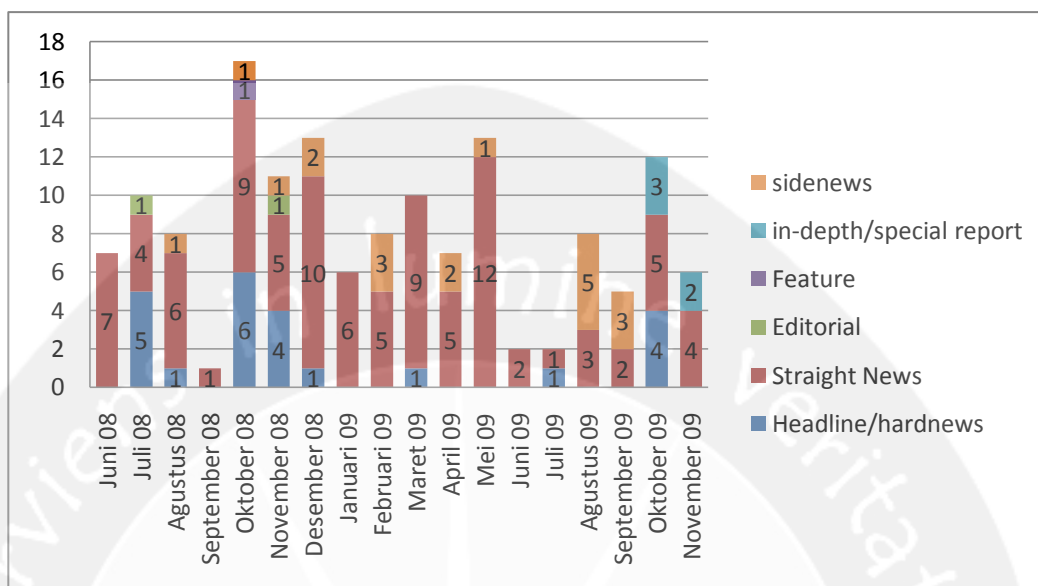
Mengenai alasan pemilihan rentang waktu (*time frame*), peneliti mengamati bahwa dalam satu kurun waktu pemberitaan tentang satu masalah, media selalu memunculkan beragam *angle* pemberitaan yang dengan demikian memunculkan

pula aneka wacana yang berbeda. Setelah berada dalam satu rentang waktu yang panjang, wacana-wacana tersebut mulai bersinkronisasi dengan wacana lain sehingga membentuk semacam peta wacana yang lebih mudah untuk diamati. Karena itu, peneliti memilih periode satu tahun untuk mengamati bagaimana wacana-wacana dalam persoalan pasir besi terbentuk dan terpetakan.

Sementara, *Harian Jogja* sebagai media yang masih baru, terbit perdana pada Mei 2008. Oleh karena itu dapat dipahami jika pemberitaan mengenai pasir besi dalam periode sebelumnya tidak ada. Namun dalam pemberitaan media manapun, ada **fluktuasi atensi media** yang menunjukkan naik-turunnya "perhatian" media terhadap suatu permasalahan atau isu yang ada sehingga pemberitaan yang ada terlihat seperti alur drama. Jika digambarkan secara visual, alur tersebut akan membentuk gelombang naik turun dimana gelombang naik bisa berarti ada isu baru yang tengah mencuat dan diberitakan secara besar-besaran, sementara gelombang turun adalah saat isu tersebut sedang "sepi" atau tidak ada hal baru untuk diberitakan. Tentunya hanya media yang bersangkutan yang akan memutuskan akan membuat berita terhadap perkembangan isu atau tidak sehingga fluktuasi ini bisa berbeda-beda antara satu media dengan yang lain.

Berikut adalah grafik fluktuasi atensi *Harian Jogja* terhadap isu penambangan pasir besi berdasarkan bentuk beritanya:

GAMBAR 2
Grafik Fluktuasi Atensi Media Harian Jogja
Berdasarkan Bentuk Berita



Keterangan:

Dasar pembagian fluktuasi atensi media ini adalah dengan melihat *order of discourse* atau bentuk wacana berupa berita mengenai pasir besi Kulonprogo.

Dari grafik tersebut terdapat **23** buah (15,6%) *hardnews* yang merupakan berita-berita yang menempati halaman muka dan dengan demikian memiliki nilai *timeliness* dan *prominence* yang tinggi. Sementara *straight news* berjumlah **96** buah (65,3%) adalah berita yang bersifat laporan langsung namun dibahas tidak terlalu dalam melainkan hanya dengan prinsip dasar 5W+1H saja. Editorial dengan jumlah **2** buah (1,4%) menunjukkan opini langsung dari media yang bersangkutan dalam rubrik Tajuk, sementara berita-berita pendek dimasukkan dalam kategori *sidenews* berjumlah **19** buah (13,6%). Sebenarnya *sidenews* dan *straightnews* tidak memiliki perbedaan mencolok selain bahwa *sidenews* lebih

pendek dan tidak mencantumkan foto peristiwa sebab ia ditempatkan dalam satu kolom kecil di setiap rubrik.

Selain bentuk berita-berita tersebut, juga ada liputan khusus (*special report*) sebanyak 2 kali dengan jumlah 5 buah berita (3,4%). Hal ini menunjukkan atensi khusus media terhadap isu hingga mengangkatnya sebagai topik liputan khusus.

Tajuk rencana yang dipilih peneliti berjumlah dua buah yang dimuat dalam periode berdekatan yakni Juli 2008 dan Agustus 2008. Tajuk ini diasumsikan muncul sebab *Harian Jogja* ingin menanggapi polemik pro-kontra mengenai rencana pra-penandatanganan Kontrak Karya pasir besi antara pemerintah dengan investor. Sementara, liputan khusus periode ini dipilih peneliti karena bulan November 2008 adalah bulan dimana Kontrak Karya (KK) kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan PT. Jogja Magasa Iron ditandatangani. Dengan demikian, reaksi berbagai pihak antara yang pro dan kontra pun semakin memuncak setelah periode tersebut. Periode setahun dipilih peneliti agar dapat memaparkan wacana persoalan rencana penambangan pasir besi secara lebih komprehensif.

G.4 Jenis dan metode pengumpulan data

Berdasarkan sumbernya, Kriyantono (2006: 43-44) membagi jenis data menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah dokumentasi berita langsung (*hardnews*), liputan khusus dan tajuk rencana SKH *Harian Jogja* dalam rentang waktu 1 Juni 2008–30 November 2009 mengenai masalah rencana penambangan pasir besi Kulonprogo serta hasil wawancara (pada level *discourse practice*) dengan redaksi media *Harian Jogja* serta pendapat dari pihak-pihak di luar media tersebut. *Time frame* tersebut dipilih berdasarkan dokumentasi kliping berita mengenai pasir besi yang dimuat di *Harian Jogja* yang mencakup tanggal penandatanganan Kontrak Karya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan PT. Jogja Magasa Iron di November 2008. Sedangkan rentang waktu setahun adalah waktu yang cukup panjang untuk memetakan tema-tema wacana yang muncul. Akhir *time frame* November 2009 dipilih untuk melihat pembentukan wacana yang terjadi setelah setahun paska penandatanganan Kontrak Karya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai data atau informasi tambahan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil perusahaan, penelitian lain, berbagai artikel, jurnal dan publikasi terkait persoalan penambangan pasir Kulonprogo, serta studi literatur yang berkaitan dengan wacana pertambangan dan jurnalisme lingkungan hidup.

Sementara itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu pada level teks, praktik wacana (*discourse practice*), dan level wacana sosiokultural (*sociocultural practice*). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data untuk level teks adalah kliping artikel berita dari *Harian Jogja* sesuai periode dan pembagian tema yang telah ditentukan. Sementara pada level praktik wacana yakni proses produksi teks, peneliti juga akan menggunakan metode wawancara mendalam dan untuk level praktik wacana sosiokultural peneliti akan menggunakan studi literatur dan wawancara dengan pihak lain di luar media.

G.5 Metode Analisis

Penelitian ini didasarkan pada paradigma kritis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis sebagai kerangka penelitian dan kerangka berpikir. Sementara untuk level analisa teks, peneliti memilih analisis framing Gamson dan Modigliani sebagai pisau analisa. Hal ini juga berdasarkan kerangka berpikir bahwa wacana media adalah hasil konstruksi realitas yang dipotret oleh media. Sehingga, framing dapat digunakan sebagai alat untuk membongkar hal tersembunyi di balik pengkonstruksian wacana tersebut.

G.5.1 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis berakar dari paradigma kritis dimana terminologi ‘kritis’ menjadi fokus utamanya. Paradigma kritis melihat pesan sebagai pertarungan kekuasaan, sehingga teks berita dipandang sebagai bentuk dominasi dan hegemoni satu kelompok pada kelompok yang lain (Eriyanto, 2001:18). Dalam kajian

paradigma kritis seperti yang dikatakan Eriyanto, realitas sosial tak hanya dipahami sebagai seperangkat fakta, tetapi hasil dari pandangan tertentu dari pembentukan realitas (Eriyanto, 2001:290). Dalam hal tersebut, media dinilai memiliki peranan penting. Stuart Hall menyebutkan bahwa media tidaklah secara sederhana dipandang refleksi dari konsensus, tetapi media mereproduksi dan memaparkan definisi dari situasi yang mendukung dan melegitimasi suatu struktur, mendukung suatu tindakan, dan mendelegitimasi tindakan lain (Eriyanto, 2001:28). Konstruksi realitas lewat media, menurut Eriyanto, menempatkan masalah representasi sebagai isu utama dalam penilaian kritis.

Salah satu kriteria yang berlaku bagi sebuah studi kritis, seperti yang diungkapkan Dedy N. Hidayat adalah sifat holistik dan kontekstual (dalam Eriyanto. 2001: xi). Kualitas sebuah analisis wacana kritis akan selalu dinilai dari segi kemampuan untuk menempatkan teks dengan analisis terhadap konteks pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Karena itu menurut Hidayat, metode analisis wacana kritis menekankan *multilevel analysis*.

G.5.2 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka analisis Norman Fairclough. Ia membagi analisis wacana kritis dalam tiga tahap analisis: teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

Berikut adalah model dari konsep tersebut:

GAMBAR 3

Model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough



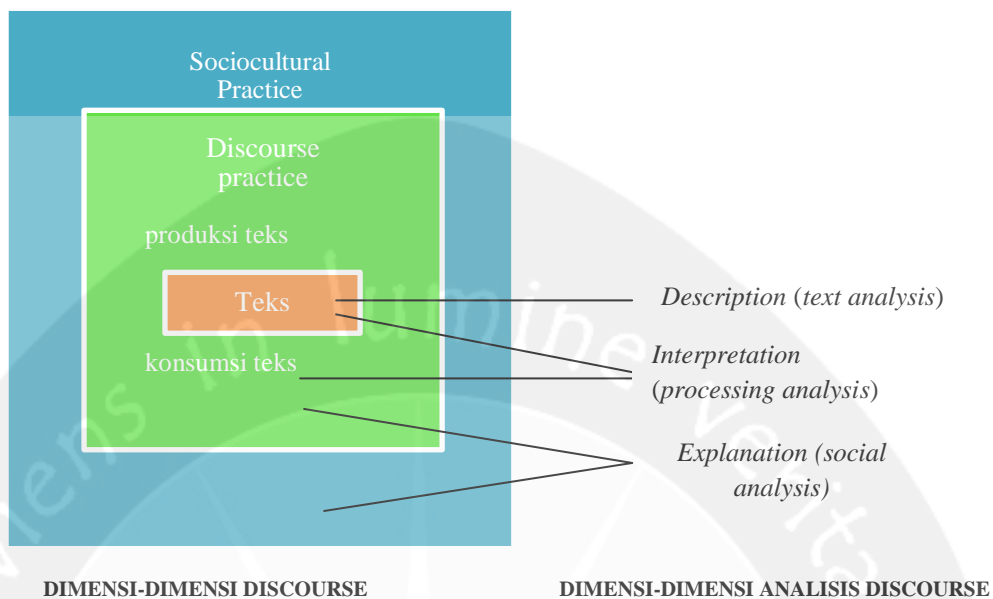
sumber: Eriyanto, 2001:288

Dari model tersebut terlihat bahwa pembentukan teks dipengaruhi oleh praktik diskursus (*discourse practice*) yakni saat proses produksi berita (pencarian, pengolahan dan pencetakan) sampai pada pendistribusian pada masyarakat/konsumsi. Produksi teks atau *text production* merupakan proses yang dilakukan secara rutin oleh sebuah institusi media. Mengenai hal itu, Fairclough mendefinisikannya sebagai, "...a collective process, involving journalist, producers, and various categories of editorial staff, as well as technical staff." (Fairclough, 1995:48). Sehingga hal tersebut bisa dipahami sebagai segala jenis kegiatan yang terjadi di *newsroom* atau dapur media sehingga menghasilkan produk berupa teks atau berita. Sementara konsumsi teks atau *text consumption* dipahami sebagai konsumsi berita oleh pembacanya. Untuk menganalisa hal ini secara khusus terdapat sebuah metode bernama *reception studies* untuk mengetahui tingkat pemahaman khalayak atas suatu wacana yang tersaji dalam bentuk pemberitaan.

Namun dalam penelitian ini, pendekatan konsumsi teks akan dilakukan dengan memahami pola logika konsumsi media. Pendekatan 5W+1H yang selalu dipakai jurnalis saat melakukan peliputan berita adalah salah satunya. Keenam hal tersebut merupakan dasar pertanyaan ketika seseorang ingin mengetahui tentang sebuah kejadian atau realitas. Setelahnya adalah nilai berita. Nilai berita yang ditonjolkan media tertentu tentu berbeda dengan kekhasan nilai berita yang ditonjolkan media lain. Misalnya saja, TEMPO lebih memilih isu-isu politik dibandingkan isu budaya, sementara KOMPAS lebih memilih isu-isu kerakyatan, atau Jakarta Post yang lebih banyak menghadirkan isu internasional. Hal tersebut dikarenakan media-media tersebut menyesuaikan dengan konsumsi segmen pembacanya. Pada level terluar, *discourse practices* juga dipengaruhi *sociocultural practices* (situational, institutional, dan sosial).

Secara keseluruhan, model analisis Norman Fairclough menuntut pemahaman teks secara utuh dengan melibatkan level praktik diskursus dan praktik sosiokultural, maka intertekstualitas akan digunakan untuk menghubungkan teks-teks pada level mikro (teks berita yang dikaji) dengan meso (*discourse practice*, produksi yang dilakukan oleh media, logika konsumsi teks oleh media), dan level meso dengan level makro (*sociocultural practice*). Maka jika digambarkan secara keseluruhan, model tersebut akan menjadi seperti ini:

GAMBAR 4
Kerangka Analisis Wacana Fairclough



Sumber: Ibnu Hamad, 2004:47

Jika dipadukan dengan hirarki institusional Shoemaker dan Reese, maka dapat dikatakan bahwa dimensi *discourse practice* khususnya produksi teks adalah level individu, *media routines* dan *organizational level*. Di situ peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak peniliti teks (jurnalis, redaktur) dan juga menanyakan perihal kebijakan redaksional, visi misi media, juga nilai-nilai dan batasan yang dimiliki oleh media itu. Pada konsumsi teks, peneliti akan menggunakan logika konsumsi media yang digunakan oleh jurnalis saat melakukan peliputan (nilai 5 W+1H, *news values*) dan juga paparan data segmentasi pembaca dari *Harian Jogja*. Sementara pada dimensi *sociocultural practice*, peneliti akan melakukan analisa pada level *extramedia* dan *ideological*. Peneliti akan melakukan studi literatur terkait dan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan kasus tersebut baik khusus maupun umum.

G.5.3 Framing sebagai Strategi Konstruksi Wacana lingkungan Hidup

Ibnu Hamad menyebutkan bahwa elemen dasar seluruh isi media massa adalah bahasa (Hamad,2004:15). Isi media cetak adalah bahasa tertulis baik berbentuk kata, angka, gambar ataupun grafis. Dengan bahasa, para pekerja media mengkonstruksikan setiap realitas yang diliputnya (Hamad, 2003:15). Maka dengan demikian, bahasa adalah nyawa kehidupan media massa.¹⁶

Lebih lanjut, Hamad mengutarakan bahwa dalam melakukan pemingkaian peristiwa tertentu media memiliki beberapa batasan seperti keterbatasan ruang kolom dan halaman. Sehingga yang terjadi, media massa kemudian menyederhanakan peristiwa yang panjang, lebar dan rumit melalui mekanisme pemingkaian (*framing*) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang.¹⁷

Untuk kepentingan tujuan penelitian, mengacu pada pendapat Ibnu Hamad (2003:21), framing dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitas sedemikian rupa, sehingga dihasilkan sebuah wacana (*discourse*) yang di dalam media massa wacana ini paling banyak mengambil bentuk dalam wujud berita. Teori framing juga bisa dipakai sebagai salah satu metode untuk memahami "*information strategy*" dalam sebuah wacana. "Sebagai kebalikan dari "strategi penyusunan realitas" maka analisis framing berfungsi untuk "membongkar

¹⁶ Dalam penelitiannya, Hamad mengkombinasikan metode semiotika sebagai alat analisis simbol-simbol politik yang muncul dalam pemakaian bahasa oleh media massa. Penelitian ini tidak memakai metode tersebut sebab konteks realitas lingkungan hidup sangat luas bahkan mencakup aspek sosial politik. Karena itu, analisa atas simbol-simbol bahasa kurang dapat diterapkan disini sebab tidak cukup komprehensif untuk menganalisa realitas lingkungan hidup

¹⁷Disarikan dari pendapat Hamad (2003:21) sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam argumennya, Hamad mencurigai bahwa dengan proses seleksi fakta dan pemingkaian yang dilakukan oleh media massa ini, konstruksi realitas sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan. Kepentingan tersebut bisa dimiliki oleh media atau pihak yang memiliki relasi khusus dengan media tersebut. lihat juga Aditjondro (2003: 43-69)

muatan wacana" (Hamad, 2003:22). Hamad juga menyebutkan bahwa pembuatan sebuah wacana tidak saja mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan (teknis, ekonomis, politis maupun ideologis), tetapi juga bisa mengarahkan: hendak dibawa kemana issue yang diangkat dalam wacana tersebut (Hamad, 2003:22)¹⁸

Maka, sasaran dari analisis framing, sebagai salah satu metode analisis wacana, adalah menemukan "aturan dan norma" yang tersembunyi di balik sebuah teks.

G.5.4 Kerangka Analisis Teks dengan Metode Framing Gamson dan Modigliani

Bagi Gamson, frame tidaklah sama dengan sekedar sikap setuju atau tidak setuju. Framing tidak berhubungan dengan apakah suatu berita setuju atau tidak setuju dengan suatu hal tertentu. Yang dipersoalkan dan menjadi titik perhatian dari framing adalah bagaimana suatu peristiwa tersebut dibingkai atau disajikan kepada khalayak (catatan kaki dalam Eriyanto, 2002:223).

Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, *frame* dipandang sebagai cara bercerita (*story-line*) atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana (dalam Eriyanto, 2002:223). Gamson melihat wacana media (khususnya berita) terdiri atas sejumlah kemasan (*package*) melalui mana

¹⁸ Hamad menjelaskan bahwa cara membentuk wacana di media massa adalah dengan mengemas (*packaging*) realitas ke dalam sebuah struktur sehingga sebuah issue mempunyai makna. Dalam struktur tersebut terhimpun sejumlah fakta pilihan yang diperlakukan sedemikian rupa--atas dasar frame tertentu--sehingga ada fakta yang ditonjolkan, disembunyikan bahkan bahkan dihilangkan sampai terbentuk satu urutan cerita yang mempunyai makna. Setiap kemasan wacana memiliki struktur internalnya sendiri dengan sebuah gagasan inti atau frame di dalamnya. Lihat Hamad, (2003: 22-23)

konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh seseorang ketika mengkonstruksi pesan-pesan yang dia sampaikan, dan menafsirkan pesan yang dia terima (Eriyanto, 2002:223-224). Selain berdasarkan pemahaman tersebut, pilihan pada metode ini juga karena alasan kepraktisan sebab peneliti lebih menguasai metode framing Gamson dan Modigliani dibandingkan metode framing yang lain sehingga hasil analisa setidaknya diharapkan mampu menjawab masalah penelitian. Berikut adalah kerangka analisis framing Gamson dan Modigliani:

TABEL 1
Kerangka Analisis Framing Gamson dan Modigliani

Frame Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is at issues	
Framing Devices (Perangkat framing)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
Metaphors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisis kausal atau sebab akibat
Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. umumnya berupa jargon atau slogan	Appeals to principle Premis dasar, klaim-klaim moral
Exemplar Mengaitkan bingkai dengan contoh uraian yang memperjelas bingkai	Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.
Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif.	
Visual images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan.	

Sumber: Eriyanto, 2002:225

Alex Sobur (2006:179) memahami struktur *framing devices* yang mencakup *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images* menekankan

aspek bagaimana “melihat” suatu isu. Sementara struktur *reasoning devices* menekankan aspek pembenaran terhadap cara “melihat” isu: *roots* (analisis kausal) dan *appeals to principle* (klaim moral). Dalam bagan yang ditunjukkan Eriyanto masih terdapat satu hal lagi yang termasuk *reasoning devices* yakni *consequences*. Dengan melihat hasil analisis kausal dan mempertimbangkan klaim moral, maka bisa didapatkan konsekuensi atau hal yang harus dilakukan terkait isu yang dibahas.

Sebagai bagian dari perangkat framing, secara literal, *metaphors* dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana (Sobur, 2006:179). Peneliti memahami *metaphors* sebagai penggunaan kata-kata yang bersifat konotatif atau kiasan untuk menggambarkan suatu hal. Setiap jenis gaya bahasa (majas) atau perumpamaan yang mengandung makna ganda, ambigu atau kiasan peneliti kategorikan sebagai *metaphors*. Maksud sebenarnya masih harus dicari dengan menganalisis kaitan penggunaan kata tersebut dengan keseluruhan teks.

Untuk menguatkan bingkai terhadap wacana, digunakan perbandingan atau contoh kasus dengan *exemplars*. *Exemplars* mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif (Sobur, 2006:179). Selain itu, ada cara lain pula yang bisa digunakan untuk menonjolkan sebuah isu yakni dengan menggunakan frase yang menarik perhatian atau *catchphrases*. Sobur juga menyebutkan bahwa

dalam teks berita, *catchphrases* biasanya berbentuk jargon, slogan atau semboyan. Meskipun ia memahami *depictions* sebagai “penggambaran fakta dengan memakai kata, istilah, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu”, peneliti melihatnya justru memiliki makna yang sifatnya denotatif meskipun sama-sama menggambarkan sesuatu dalam teks. Sedangkan *visual images* adalah pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya dalam teks untuk menguatkan bingkai.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggambarkan kerangka alur analisis yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut:

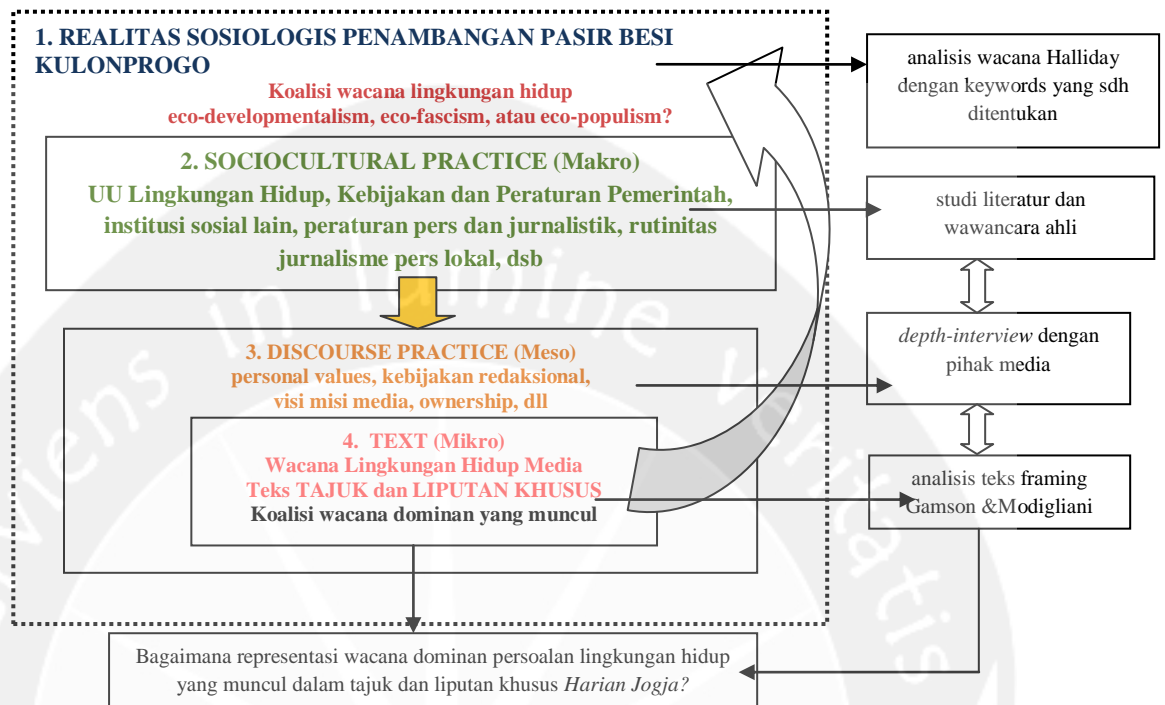
TABEL 2
Kerangka Analisis Penelitian

Level Masalah	Level Analisis	Metode
teks	mikro	Analisis framing Gamson dan Modigliani
<i>discourse practice</i>	meso	Wawancara mendalam dengan pihak media dibantu literatur
<i>sociocultural practice</i>	makro	Studi pustaka, penelusuran data pendukung dan wawancara dengan sejumlah pakar lingkungan hidup dan sosial.

Sumber: Ibnu Hamad, 2004: 48

Dari keseluruhan metode penelitian yang akan peneliti gunakan sebagai kerangka analisis dan alur kerja, peneliti menyatukan keseluruhan konsep dalam sebuah bagan desain penelitian. Jika disajikan dalam bagan alur yang lebih lengkap, peneliti mencoba menggambarannya seperti berikut:

GAMBAR 5
Desain Penelitian Wacana Pertambangan dan Praktik Jurnalisme
Lingkungan Hidup *Harian Jogja*



Keterangan:

1. Realitas sosiologis penambangan pasir besi Kulonprogo.

Realitas sosiologis penambangan pasir Kulonprogo ini menampilkan koalisi wacana lingkungan hidup yang melibatkan para pelantun wacana (pemerintah kabupaten Kulonprogo, PT. JMI, WALHI, LBH-Yogya, PLPP, dll). Realitas ini dianalisa dengan metode analisis wacana Halliday untuk memetakan wacana yang terdapat dalam realitas sosiologis melalui pemberitaan di media-media lain dan sumber-sumber terkait. Dalam penelitian, realitas ini diamati dari hasil analisa terhadap berita-berita tentang pasir besi yang dimuat Harjo selama Juni 2008 – November 2009.

2. Sociocultural Practice

Merupakan dimensi wacana makro yang mempengaruhi level meso dan mikro. Sesuai dengan level hirarki institusional, dalam dimensi ini terdapat pengaruh dari *extramedia* dan *ideological level*. Hal ini dapat tercermin dari kebijakan dan UU lingkungan hidup, terutama yang terkait dengan pertambangan, yang berlaku, institusi-institusi lain terkait seperti Bapedal (Pemerintah), LSM (Walhi, LBH-yogya, Jatam, dll) dan ahli bidang lingkungan atau pertambangan (Dosen Geologi UGM, atau tenaga kompeten) juga dari tinjauan historis umum pers Indonesia.

3. Discourse Practice

Merupakan level meso yang memuat level individu, *media routines* dan *organizational level* yang mempengaruhi konstruksi wacana (teks berita). level ini dianalisa dengan melihat visi misi organisasi, kebijakan redaksional, faktor *ownership* dan juga latar belakang individu/jurnalis yang memproduksi teks berita terkait.

4. Text: Wacana Lingkungan Hidup Media

Merupakan level mikro dalam dimensi analisis wacana sekaligus hasil dari konstruksi wacana lingkungan hidup yang dilakukan oleh media. Dianalisa dengan analisis framing Gamson dan Modigliani terhadap teks tajuk dan liputan khusus yang muncul selama *time frame* penelitian.

5. Mendeligitimasi atau Melegitimasi

Analisa perbandingan apakah wacana lingkungan hidup yang ditampilkan dari hasil analisis tajuk dan liputan khusus media *Harian Jogja* melegitimasi atau mendelegitimasi wacana dominan lingkungan hidup yang ada pada realitas sosiologis. Dari situ dapat diketahui jurnalisme lingkungan hidup seperti apakah yang dijalankan oleh media yang bersangkutan.

Peneliti memiliki beberapa **asumsi hipotesa penelitian** berdasarkan kerangka teori dan analisis yang telah dikemukakan dan juga hasil penelitian Wittmer dan Birner sebagai berikut:

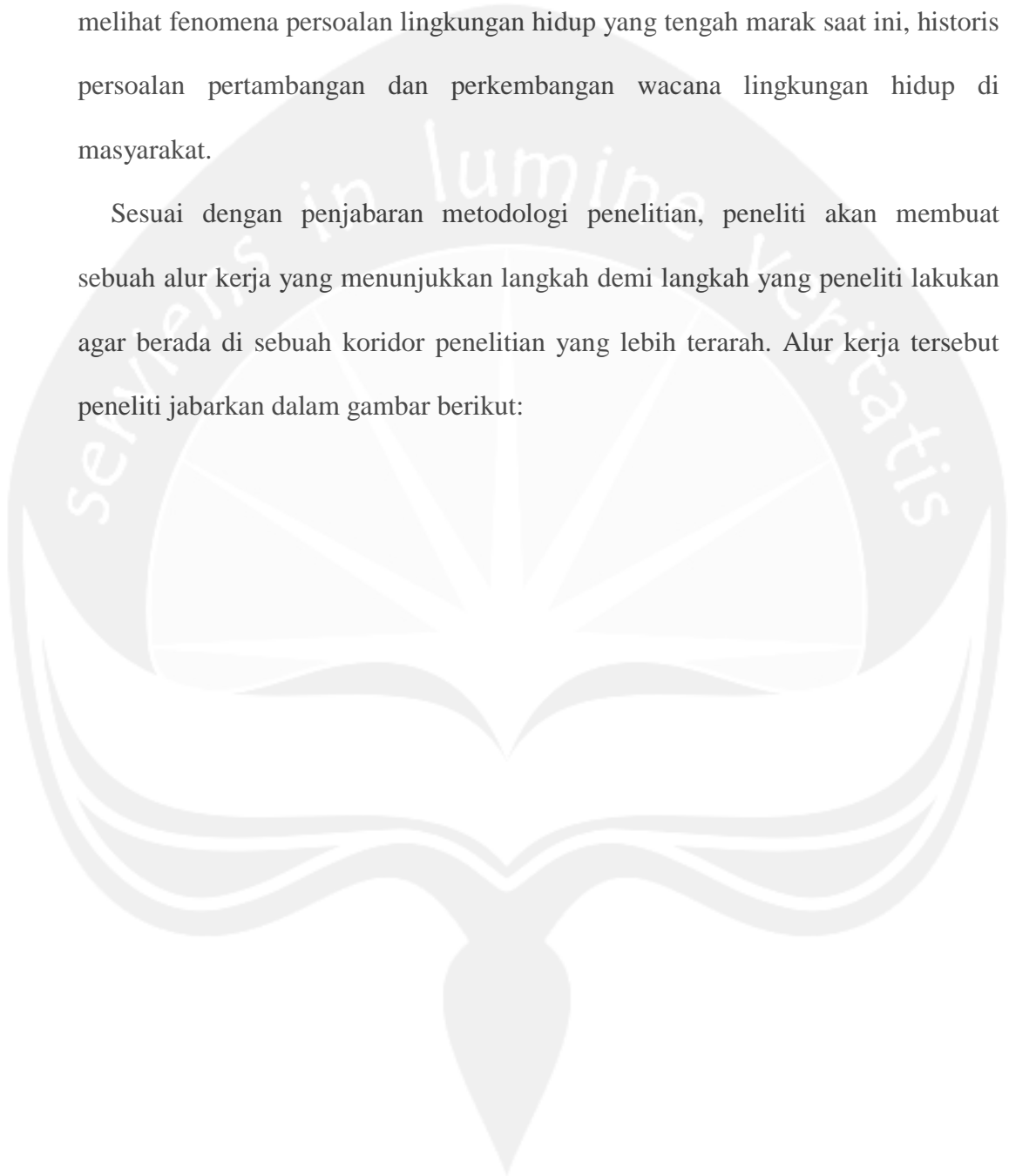
Dalam usaha pengkonstruksian wacana, media akan cenderung condong pada:

1. *Eco-developmentalism* **jika** ia lebih sering bicara mengenai pemanfaatan potensi sumber daya alam, kesejahteraan, peningkatan pendapatan daerah dan investasi.
2. *Eco-populism* **jika** ia menampilkan lebih banyak mengenai hak-hak rakyat atas tanah, kearifan lokal, kekhawatiran warga dan juga resiko pelanggaran HAM serta dampak jangka panjang bagi sosial budaya.
3. *Eco-fascism* **jika** ia membicarakan mengenai penolakan keras terhadap segala bentuk eksploitasi, konservasi alam, dan ancaman kepunahan spesies.

Perlu peneliti sampaikan bahwa asumsi hipotesa yang peneliti susun ini berbeda dengan hipotesis penelitian pada penelitian kuantitatif yang memiliki faktor-faktor pengaruh yang pasti dan turunan variabel penelitian. Peneliti memahami bahwa setiap penelitian, pasti memiliki asumsi awal berdasarkan

kerangka berpikir, *common sense* atau dapat juga hasil analogi sederhana berdasarkan observasi pengalaman si peneliti peneliti dalam melihat persoalan realitas sosial. Maka asumsi tersebut juga diberlakukan pada penelitian ini dengan melihat fenomena persoalan lingkungan hidup yang tengah marak saat ini, historis persoalan pertambangan dan perkembangan wacana lingkungan hidup di masyarakat.

Sesuai dengan penjabaran metodologi penelitian, peneliti akan membuat sebuah alur kerja yang menunjukkan langkah demi langkah yang peneliti lakukan agar berada di sebuah koridor penelitian yang lebih terarah. Alur kerja tersebut peneliti jabarkan dalam gambar berikut:



GAMBAR 6
Bagan Alur Kerja Penelitian

